



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**MENTERI PERTANIAN RI, KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL, DIRUT PT
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO), DIRUT PERUM BULOG,
DIRUT PT PUPUK INDONESIA (PERSERO), BESERTA ANAK PERUSAHAAN**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 12.39 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat : Ir. Budhy Setiawan, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Didampingi oleh:
Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Acara : Membahas:
1. Evaluasi Anggaran Tahun 2024;
2. RKA dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2025;
dan
3. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., QIA, QGIA (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir : **A. Anggota DPR RI**
29 dari 54 orang Anggota, dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 dari 12 orang Anggota
1) Ono Surono, S.T.
2) Drs. I. Made Urip, M.Si.
3) Vita Ervina, S.E.
4) Maria Lestari, S.Pd., M.H.
5) Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya

5 dari 8 orang Anggota

- 1) Budhy Setiawan/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
- 3) Firman Soebagyo, S.E., M.H.
- 4) Ir. Hanan A. Rozak, M.S.
- 5) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

4 dari 7 orang Anggota

- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M, IPU.
- 3) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
- 4) Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

4 dari 6 orang Anggota

- 1) H. Sulaeman L. Hamzah
- 2) Ir. Abdullah Tuasikal, S.Msi.
- 3) Julie Sutrisno
- 4) Ir. Hj. Sri Kustina

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Daniel Johan, S.E., M.M.
- 3) Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat

2 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
- 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

3 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M.
- 2) Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.
- 3) Hj. Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

1 dari 4 orang Anggota

- 1) Ir. Alimin Abdullah

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2 dari 2 orang Anggota

- 1) Ema Umiyyatul Chusnah
- 2) K.H. Asep Ahmad Maoshul Affandy, S.Sy.

B. Pimpinan/Anggota Izin

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
2. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
3. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. drh. H. Slamet

C. Pemerintah

1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. (Menteri Pertanian RI);
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Plt. Sekretaris Jenderal sekaligus Direktur Jenderal Hortikultura Kementan RI)
3. Komjen. Pol Drs. Setyo Budiarto, SH., M.H. (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI)
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI)
5. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI)
6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI)
7. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI)
8. Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementan RI)
9. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan RI)
10. Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional) beserta jajaran
11. Bayu Krisnamurthi (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran
12. Rahmad Pribadi (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan
13. Sis Apik Wijayanto (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD) beserta anak perusahaan.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. BUDHY SETIAWAN, M.Si./F-P.GOLKAR):

Kita mulai.

Berdasarkan daftar kehadiran masih belum memenuhi kuorum. Dari, Mas, dari keanggotaan. Jumlah fraksi sudah memenuhi kuorum, baik sudah tujuh, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding
Pangan ID Food beserta jajaran, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 Maret 2024 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024, pada hari ini Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero dan PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food beserta anak perusahaan, dalam rangka membahas Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2025, dan isu-isu aktual lainnya.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(KETUK PALU 1 KALI)

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.39 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 12.50 dan akan diakhiri pukul 15.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang meliputi rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah. Selanjutnya, hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja pada hari ini adalah sesuai surat Badan Anggaran nomor B/3706/AG.01.01/04/2024 tanggal 2 April 2024 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai acuan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Tidak terasa bahwa periode pemerintahan 2019-2024 hampir berakhir. Berbagai kebijakan pembangunan telah diambil khususnya dalam sektor pertanian yang tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa di antaranya adalah melalui upaya peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, peningkatan kualitas konsumsi pangan, penyediaan akses sarana dan

prasarana pertanian, bantuan benih atau ternak hingga upaya penguatan kelembagaan petani. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sektor pertanian mengalami berbagai tantangan dan rintangan baik eksternal maupun internal. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, terlebih kita menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada produksi pertanian yang berpotensi menimbulkan krisis pangan.

Pada tahun 2025 Kementerian Pertanian mendapatkan pagu indikatif sebesar 8,066 triliun. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian tetap fokus dan kebijakan yang disusun harus terus berpihak kepada kesejahteraan petani, peternak, pekebun berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi lokal. Komisi IV DPR RI berpendapat sebaiknya kebijakan sektor petani pertanian pada tahun 2025 ini tetap diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga pangan, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan pasca panen serta penguatan sumber daya manusia pertanian. Kebijakan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi, diversifikasi produksi pertanian, hingga penyiapan SDM pertanian seiring dengan penguatan kelembagaan pertanian.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menjelaskan secara mendetil mengenai rancangan dan rencana kerja program Kementerian Pertanian tahun 2025 tersebut.

Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya,

Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat membahas pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang hingga saat ini masih terdapat permasalahan yang perlu segera dicari solusinya. Salah satunya adalah masalah kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi akibat sistem *hybrid*, di mana pihak distributor diharuskan untuk membayar kelebihan penyaluran tersebut. Kementerian Pertanian seharusnya memiliki basis data yang valid sebagai acuan penentuan E-RDKK sebelum menerapkan sistem penyaluran, sehingga permasalahan kelebihan penyaluran tidak terjadi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut akan diputuskan juga pada Rapat Kerja hari ini.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan Pak.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati kami banggakan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pangan Nasional,
Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Karantina,
Yang kami hormati Direktur Utama Perum Bulog,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Pupuk Indonesia,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat.

Saya dan segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini dengan agenda Evaluasi Anggaran Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan isu-isu aktual lainnya.

Pimpinan, Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Tanpa terasa tahun 2024 sudah berjalan hampir satu semester dengan berbagai dinamikanya. Saat ini pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya akibat dampak perubahan iklim ekstrem *El Nino*, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, Israel-Palestina, dan perang dagang Amerika-China menyebabkan adanya restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan serta dampak dinamika ekonomi global yang berpotensi menimbulkan krisis pangan. Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui usaha kerja keras semua jajaran Kementerian Pertanian di tingkat pusat maupun daerah, sinergi antar kementerian lembaga dan *stakeholder* lainnya serta dukungan dan arahan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV di berbagai kesempatan, sampai saat ini kita mampu menghadapi dan melewati tantangan itu semua.

Terkait dengan Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024, kami dapat laporkan bahwa pagu APBN sebesar 13,73 triliun dengan memperhitungkan *outstanding contract*, realisasi anggaran Kementan per tanggal 18 Juni 2024 mencapai 5,8 triliun atau 42,3%, dan apabila memperhitungkan *blokir automatic adjustment*, maka realisasi mencapai 43,74%. Rincian realisasi anggaran tahun 2024 pada Eselon I seperti bahan Raker yang

telah disampaikan pada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Sementara perkembangan capaian produksi beberapa komoditas utama pertanian tahun 2024 dapat kami laporkan sebagai berikut: Padi 29 juta ton dari target 52,4%, jagung 10 juta ton, kedelai 0,11 juta ton, bawang merah 0,66 juta ton, aneka cabai 0,85 juta ton, kopi 0,38 juta ton, tebu 27,67 juta ton, daging sapi kerbau 0,1... 0,16 juta ton, daging kambing domba 0,033 juta ton, daging ayam 1,5 juta ton, dan telur ayam 2,9 juta ton.

Sedangkan perkembangan capaian beberapa *output* utama Kementerian Pertanian dapat kami sampaikan sebagai berikut: Program pengembangan padi 25,4%, pengembangan jagung 35%, kawasan bawang merah 59%, kawasan aneka cabai 93%, kawasan lada 40%, kawasan karet 15%, optimalisasi reproduksi 56%, asuransi pertanian 43%, irigasi perpompaan 26%, alsintan 78,6%, pasca-panen 23,7%.

Pimpinan, Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Sebagai agenda kedua, kami menyampaikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025, tema rencana kerja RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan tema RKP Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Indonesia Emas khususnya IPTEK inovasi dan produktivitas ekonomi dan ketahanan energi serta air dan kemandirian pangan yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian, maka Kementerian Pertanian akan fokus pada empat program: program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen. Dari empat program tersebut lebih lanjut dituangkan dalam program kegiatan strategis yang oleh dirjen, Ditjen Komoditas dan kegiatan pendukung yang diampu oleh ditjen dan badan lainnya.

Dengan berpatokan pada empat program tersebut dalam rangka penyediaan pangan utama bagi penduduk Indonesia dan peningkatan daya saing produk pertanian, Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada tahun 2025 dengan target produksi sebagai berikut: Padi sebesar 56 juta ton, jagung 16 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641 ribu ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi 405 ribu ton, dan daging ayam 4 juta ton.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2025 berdasarkan surat SBPI Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B201D8/PP.04.03/04/2024 dan S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024 tentang

Pagu Indikatif Belanja KL dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, maka Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 8,06 triliun. Dari pagu indikatif ini kalau dilihat dari sumber pembiayaannya di mana hanya sebesar 6 triliun merupakan rupiah murni, di mana dalamnya sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang cukup tinggi, sisanya 2 triliun merupakan non-rupiah murni.

Menindaklanjuti SBPI tersebut, Kementerian Pertanian telah menyampaikan rancangan pagu indikatif melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B.1261/RC.110/A/04/2024 tanggal 26 April 2024. Rincian alokasi pagu indikatif menurut program dan adalah sebagai berikut: Ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas 3 triliun, nilai tambah dan daya saing industri 1,6 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi 658,64 miliar dan dukungan manajemen 2,78 triliun. Sementara rincian pagu indikatif per Eselon I adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal 1,12 triliun, Inspektorat 58,24 miliar, Dirjen Tanaman Pangan 1 triliun, Dirjen Hortikultura 900 miliar, Dirjen Perkebunan 407 miliar, Dirjen PKH 1,2 triliun, Dirjen PSP 1,22 triliun, Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian 1,12 triliun, Badan PPSDMP 932,24 miliar.

Mengingat pagu indikatif pada tahun 2025 relatif masih terbatas, Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 26,64 triliun, sehingga total anggaran Kementerian Pertanian setelah ditambah pagu indikatif 8 triliun menjadi 34,7 triliun dan diharapkan bisa kembali seperti yang pernah dialokasikan pada tahun 2025, eh *sorry* 2015. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan mengusulkan adanya tambahan anggaran mendukung asta-cita presiden terpilih yaitu khususnya untuk cetak sawah 1 juta hektar 25 triliun. Dengan demikian, total tambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian diharapkan nanti menjadi 59,7 triliun.

Rincian penggunaan usulan tambahan anggaran dimaksud seperti terdapat pada lampiran bahan Raker sudah disampaikan kepada Bapak Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI. Untuk itu, mohon dukungan dari Pimpinan Anggota Komisi IV DPR RI terhadap usul tambahan anggaran tersebut.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sebagai agenda terakhir kami sampaikan kesiapan Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi musim kemarau 2024. Berdasarkan Surat BMKG Tanggal 24 Mei 2024 perihal Kesiapsiagaan Kekeringan, maka musim kemarau di Indonesia diprediksi mulai bulan Juni sampai dengan September 2024 dan puncaknya pada bulan Agustus 2024. Untuk itu, perlu segera diantisipasi dampaknya terhadap kinerja produksi pangan dalam negeri termasuk *El Nino* tahun 2023 yang dampaknya masih berlanjut ke tahun 2024. Data BPS menunjukkan bahwa luas tanam padi selama masa tanam Oktober 2023 sampai April 2024 sebesar 6,55 juta hektar mengalami penurunan 3,8 juta hektar atau 36%. Jika dibandingkan dengan rata-rata periode yang sama tahun 2015 sampai

2019, yaitu 10,39 juta hektar. Perluasan luas tanam ini tentunya sangat berpengaruh ke luas panen yang pada gilirannya berdampak pada penurunan produksi padi yang dihasilkan. Kementerian Pertanian berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi musim kemarau melalui kegiatan sebagai berikut: pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi lahan rawa, optimalisasi waduk/bendungan, teknologi budidaya pertanian hemat air, dan gerakan panen air.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja hari ini. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, kami mohon berkenaan Bapak Pimpinan agar Pejabat Eselon I yang terkait dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan.

Atas perhatian Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan. Mungkin ada tambahan yang bisa dapat disampaikan juga terkait kelebihan salur pupuk bersubsidi tersebut Pak, bisa disampaikan menurut Bapak sebaiknya bagaimana karena kita akan putuskan di rapat kerja hari ini. Nah, saran terbaiknya kita berharap kemarin sudah ada rundingan antara Bapak dengan Direktur PI untuk mencari jalan keluarnya seperti apa Pak?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kami sepintas tadi sudah diskusi dengan Dirut PI.

Izin Pak Ketua, saran kami, kami dulu ingin mengecek detail di bawah yang mana betul-betul salah yang mana ada kesengajaan yang kemudian masalah kelebihan dan seterusnya, mungkin kami atas arahan Bapak Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI mungkin kami perlu berkoordinasi dengan BPK langsung karena surat sudah dikeluarkan dari BPK. Mungkin kami juga membuat surat tertulis nantinya ke BPK dan mengikutsertakan direksi PT PI dan bahkan kalau bisa mungkin datang kami konsultasi khusus menghadap ke sana. Yang terpenting apa usulan Bapak, kami akan proses sesuai prosedur yang ada karena kita tahu bahwa di kementerian sekarang masalah cukup serius, jangan terulang lagi ke depan. Kalau kami, kami ikut arahan dari pimpinan dan kami tindak lanjuti dan kami akan laporkan kembali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Menteri.

Karena terkait dengan perkembangan rapat kemarin kita rapat dengar pendapat terkait penyaluran pupuk bersubsidi, harapan dari teman-teman Komisi IV bahwa memang kemarin ini masih terjadi ya perpindahan dari sistem T-Pubers ke I-Pubers, di mana dalam peralihan itu memang ada juga arahan begitu dari Pak Menteri yang lalu bahwa memang juga atas harapan dari kita karena T-Pubers ini bersoal gitu di dalam penyalurannya akhirnya disepakati bisa tebus dengan KTP, Pak. Akhirnya terjadilah ada yang nebus lewat T-Pubers ada yang nebus lewat KTP. Harapan kawan-kawan dari dapil masing-masing perkembangannya ini bahwa kalau memang itu pupuk bersubsidi sudah disalurkan Pak, memang nanti saya apa namanya hargai bahwa Pak Menteri nanti akan melakukan peninjauan lagi melihat lagi kondisinya begitu *plus* nanti mau bersurat juga ke BPK, tapi harapan dari teman-teman dari rapat dengar pendapat kemarin kalau itu pupuk bersubsidi memang sudah disalurkan untuk penanaman, sebaiknya memang apa namanya harus bisa dimaklumi juga Pak karena sudah disalurkan juga Pak, sudah disalurkan dipakai nanam. Sekarang kalau kejadiannya dikejar-kejar Pak mereka, begitu kan terhadap lebih salur ini begitu kan ya buat kios dan buat distributor ini kondisinya memberatkan juga begitu.

Jadi itu saja Pak harapan dari teman-teman Komisi IV yang nanti bisa disampaikan ke BPK itu Pak.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan. Pimpinan tambahan mungkin.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri, ya kemarin kan kita sudah diskusi sangat panjang ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Budhy saya melihat bahwa salah salur itu akan sulit ditagih dan ini akan membawa dampak terhadap distribusi pupuk subsidi berikutnya Pak karena PT PI pasti mempunyai konsekuensi terhadap temuan BPK tersebut. Dia akan memberikan sanksi PT Pupuk kepada kios distributor yang tidak membayar temuan BPK tersebut. Petani pun ya laporan Pak Budi teman-teman sama kondisinya, mereka merasa bahwa mereka tidak salah dengan sistem

hybrid double system yang tidak saling mengikat saling mengunci. Nah sehingga hari ini ya saya sih dan mudah-mudahan teman-teman berharap ada satu kejelasan langkah Pak Menteri, dalam hal misalnya koordinasi dengan BPK. BPK tentunya juga kan harus tahu bahwa tidak serta-merta terjadi begitu saja tapi ada *double system* tersebut. Nah, sehingga saya pikir Pak Menteri juga yang pertama harus harus menjelaskan kepada BPK kenapa hal itu terjadi.

Nah yang kedua, terkait dengan tadi yang Pak Menteri sampaikan yang ada rekayasa memang saya setuju ya harus benar-benar dilihat secara betul. Rekayasa dan memang murni ketidaktahuan petani ketidaktahuan kios atau apapun ya ini pun juga mohon menjadi perhatian.

Nah yang ketiga, walaupun memang ada solusi yang cepat, saya sih usul Pak Menteri juga berkoordinasi dengan BPK tersebut misalnya bisa enggak temuan BPK itu yang bayarnya Kementerian Pertanian, tidak dibebankan ke PT PI, ke distributor, ke kios, ke petani karena toh hasil dari produksi padi yang kemarin juga kan kita rasakan bersama. Sehingga menurut saya dengan semangat Pak Menteri, saya yakin bisalah menyelesaikan permasalahan ini. Dan hari ini semuanya menunggu, Pak Budhy benar ya? Cianjur menunggu kan Pak, Cirebon, Indramayu juga menunggu Pak keputusan pada rapat hari ini. Intinya Pak Menteri siap bertanggung jawab atau tidak? Tapi dengan tadi bahasa di awal saya yakin Pak Menteri bisa mengambil langkah-langkah strategis dan bertanggung jawab terkait dengan kesalahan salur pupuk subsidi tersebut.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Pak Ketua intinya begini Pak jangan kita dzolimi petani, saya setuju. Sejak awal sejak kami menteri periode pertama jangan. Kami berupaya keras kalau kami juga usulannya Pak Ono, kalau BPK setuju demikian saya pasti tanda tangan. Katakanlah kementerian yang mengganti, itu enggak masalah juga, yang penting jangan kalau kami jangan korbankan petani makanya saya panggil duduk di samping.

Nah, yang kedua tolong jangan saklek seperti Pak Ono sampaikan bahwa besok mau dikasih peringatan macam-macam. Kami diberi kesempatan dulu komunikasi langsung, nanti Pak Ono aku ketemu langsung BPK-nya.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Jadi di-*hold* dulu Pak jangan ditagih dulu petaninya Pak.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Jangan ditagih dulu nanti kami sudah,

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Tepuk tangan dong untuk Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Jadi ini nanti kami bicara di sana. Tetapi kalau nanti mungkin apa memungkinkan untungnya Bapak kan dikurangi sedikit daripada aku kasih PT apa namanya Bulog yang salurkan, kan pasti Bulog juga mau salurkan pupuk, kan banyak untungnya ini, daripada aku yang minta kan cukup petani yang dikasih, oke gitu ya.

Intinya jangan sakiti petani itu permintaan Komisi IV dan jangan melangkah sebelum ada pembicaraan saya. Banyak solusi, mau Pertanian, kami juga bisa ambil alih ke depan, kami bisa masukkan Pertanian. Kalau itu tidak, kita bisa tunda dulu. Kalau BPK mencabut yang betul-betul mencabut suratnya, bukan mencabut sih, revisi itu bisa ditempuh. Yang paling buruk nanti mungkin yang jelek adalah dicicil keuntungannya dipotong sedikit-sedikit sampai sekian bulan mungkin itu yang paling ringan kan jumlahnya kecil cuma 130 miliar kecil enggak besar. Saya pikir tadi 1 triliun, kalau 1 triliun susah saya bahas tapi kalau 100 *insya* Allah, saya kira ada solusi. Itu intinya Pak kami tidak akan melakukan penalti jangan Pak ya. Jangan melakukan teguran lebih baik kita yang ditegur BPK daripada orang kecil yang disakiti Pak. Semangat kita sama, terima kasih.

Ya terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri, sangat luar biasa tanggapan Pak Menteri.

Dan kepada teman-teman komisi perlu saya sampaikan bahwa kita sudah melalui FGD bersama dengan Pak Menteri, Komisi IV dalam rangka membahas evaluasi tahun anggaran 2024 jadi cukup catatan-catatan singkat saja dari teman-teman nantinya. Kemudian juga untuk tahun anggaran 2025 karena ini pembahasan pendahuluan APBN jadi mungkin yang perlu dari teman-teman adalah dukungan terhadap total anggaran yang nanti akan ditambah. Jadi mungkin enggak perlu dibahas secara rinci masing-masing per program karena ini baru pembahasan pendahuluan saja begitu.

Saya persilakan kepada Bu Anggia untuk memimpin jalannya dialog. Saya persilakan Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik terima kasih Pak Budhy.

Pak Menteri, Pak Arief dan semua jajarannya, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu per satu, Bapak Ibu para anggota,

Senang sekali lega sekali Pak Menteri terima kasih atas tanggapan respon yang *quick* dan melegakan. Terus terang memang kemarin kita rapat serius dan lama karena ini masalah kan tidak hanya ada di Jawa Barat. Kebetulan Pak Budhy di Cianjur banyak, Jawa Timur juga banyak juga paling banyak malahan di Jawa Timur. Dan memang di lapangan terjadi sampai bacok-bacokan ya petani yang kemudian memang merasa terugikan. Oleh karena itu tanggapan Pak Menteri ini sangat ditunggu dan melegakan. Artinya Pak Menteri bertanggung jawab dan bisa menjawab bahwa jangan sampai petani ini dirugikan. Memang tidak sengaja, artinya kan tidak sengaja para petani itu untuk menggelapkan atau menambah kuotanya kan begitu karena sistem yang memang belum terkunci. Sebagai informasi Bapak-Ibu para Anggota, kemarin sudah dibahas bahwa sistemnya sudah terkunci ya Pak Sekjen ya Pak Ali Jamil, Pak Ali Jamil mana? Oh ya. Sistemnya sudah terkunci sehingga antisipasi ke depan tidak akan terjadi lagi. Tetapi tolong untuk dipastikan Pak Ali Jamil tolong dipastikan bahwa kejadian kelebihan salur ini tidak terjadi lagi, kasihan karena mereka harus berhubungan dengan tagih-menagih yang orang kalau ditagih itu gak enak, ditagih apapun lah ya gak enak, apalagi ditagih utang kan gak enak.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Tentang apa anggaran tentang anggaran ini pagu yang sebenarnya dikatakan oleh Pak Budhy tadi bahwa ini adalah pagu pendahuluan indikatif yang memang ya nanti akan kita detilkan kalau Bahasa Jawa itu Pak Menteri namanya kita *jelenterehkan*, Pak Arief tahu. Kita detilkan setelah menjadi apa pagu yang definitif. Oleh karena itu, Bapak-Ibu saya pikir tidak terlalu lama dan tentu saya juga yakin sahabat-sahabat atau teman-teman dari Komisi IV sangat mendukung tentang anggaran Pak Menteri dan anggaran tambahan.

Kalau lihat anggarannya Pak Menteri ini anggaran Kementan ini enggak serius ini negara itu. Ngomongin tentang pangan, ngomongin tentang sekarang hari ini ada krisis pangan global misalnya, ngomongin tentang *El Nino*, ngomongin tentang *climate change* yang tidak mendukung atas produktivitas apa pangan kita, lahan yang sudah banyak turun, enggak ada seriusnya negara ini terhadap keberpihakan terhadap kemandirian kedaulatan pangan.

Selanjutnya, silakan Pak Salim Fakhry, bupati kita, masa yang akan datang bupati idola kita. Silakan Bang Salim.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan yang manis.

Pak Menteri yang baik hati dan kawan-kawan semua,

Saya langsung saja Bu karena waktu kita jam 2, berarti 40 menit lagi Bu, supaya singkat-singkat saja Bu karena kita ada rapat selanjutnya nanti.

Saya kira gini saja masalah pagu anggaran yang dipaparkan oleh Pak Menteri. Sebaik apapun program yang dibuat dari kawan-kawan kementerian tanpa didukung dengan alokasi pendanaan sama juga itu hanya membuat program yang sia-sia. Konkretnya tugas kita di Komisi IV mendorong kawan-kawan di kementerian ini terutama bagi kami yang mewakili Banggar dari Komisi IV untuk mendorong, karena baru hari ini mulai pembahasan anggaran Pak Menteri di Banggar. Saya kira ini kita bersepakat dengan kementerian kalau perlu ada nanti koordinasi dengan Banggar dari Komisi IV, mungkin yang dipandu oleh Pak Sekjen mewakili Pak Menteri. Bahan-bahannya tolong diberikan kepada kita Bu, supaya di situlah letak kemitraan antara kementerian dengan Komisi IV. Hasil FGD yang lalu sudah bagus Bu. Kementerian mengasih nanti yang untuk ini, untuk itu kepada masyarakat, nyatanya anggaran hanya 8 triliun. Walaupun kita katakan ini adalah pagu indikatif sementara, cuman kalau tidak kita dorong melalui mekanisme melalui Banggar, saya kira ini hanya penambahan nanti hanya dibalikkan lagi hanya belasan Pak Menteri. Sementara kita butuh mungkin 40 sampai 50 triliun. Tidak pun sampai begitu, makanya kita berharap dari kementerian mungkin melalui Pak Sekjen, memang ada duduk supaya apa yang kita ungkapkan apa yang kita ucapkan dalam forum Rapat Banggar nanti bisa mendapat respons dari anggota Banggar.

Saya kira saya tidak berlama-lama Bu karena rapat ini tidak perlu lama-lama Bu, kesimpulannya yang perlu saya kira itu saja masukkan dari kami.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik terima kasih Bang Salim.

Bang Salim itu intinya Pak Menteri, Pak Sekjen, proaktif menjemput yang 34 triliun tadi.

Pak Azikin Solthan, silakan.

F-P. GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya,
Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Dirut Perum Bulog, Bapak PT
Pupuk Nusantara, PT Rajawali beserta rombongan yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala* atas rahmat, taufik dan hidayahNya yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian beserta seluruh jajarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama dari data yang ditampilkan, rata-rata proses capaian produksi semua komoditas per Juni 2024 sekitar 45,49% masih sangat jauh dari target yang ditetapkan terutama pada komoditas-komoditas pangan dan komoditas lain penyumbang inflasi. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap komoditas pertanian terus bertambah. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian serius, jangan sampai penurunan produksi hasil pertanian ini menjadi masalah yang terkesan tidak ditanggulangi sehingga negara ini harus terus menambah kuota impor pangan. Padahal memiliki potensi sektor pertanian yang kaya jika dikelola dengan baik.

Fraksi Gerindra mendorong agar ada perbaikan sistem data penyaluran pupuk bersubsidi terkait adanya permasalahan kelebihan penyaluran dan Kementerian Pertanian agar menghimbau para petugas penyuluh pertanian lapang untuk berkoordinasi dengan para kios pupuk untuk pemantauan sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani penerima pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra meminta PT Pupuk Indonesia agar meninjau kembali isi surat perjanjian jual-beli antara PT Pupuk Indonesia dengan distributor pupuk agar tidak terlalu memberatkan kepada pihak distributor pupuk dan menghitung ulang data nilai tagihan lebih salur pupuk subsidi dengan menerapkan harga pokok produksi pupuk serta memberikan perpanjangan rentang waktu pelunasan hutang lebih salur kepada PT Pupuk Indonesia karena distributor pupuk perlu waktu untuk menagih ke kios pupuk dan petani yang lebih salur.

Selanjutnya, mencermati RKP 2025 bagaimana strategi Kementerian Pertanian mendukung program makan bergizi gratis yang merupakan program nasional presiden terpilih.

Demikian masukan dan pertanyaan yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Billahi fii sabil haq,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik, terima kasih Pak Azikin.

Pak Ono, Gubernur Jawa Barat.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Aamin ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Budhy, Ibu Anggia, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Bapak-Ibu sekalian para Direktur BUMN di bidang pertanian terima kasih atas kesempatannya.

Yang pertama terkait dengan anggaran atau pagu anggaran ya yang tadi sudah Pak Menteri sampaikan. Jadi kan kita mempunyai tren turun nih Pak 2015 Pak Menteri punya pagu indikatif itu mencapai 32,8 triliun atau bahkan 34 triliun ya dulu ya turun 27, turun 21, turun 16, terakhir 14, sekarang 8, *Astagfirullahaladzim*. Di saat di dunia sudah bicara krisis pangan, di saat Indonesia mulai terjadi inflasi, harga beras yang tidak turun, hari ini kita mendengar minyak goreng dinaikkan Rp1.500 menjadi 15.000 per liter dan saya yakin komoditas lainnya juga sama, maka Pak Menteri, anggaran yang kecil saya yakin tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia dengan problematika yang sangat besar dan luas. Sehingga, kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya Pak Menteri untuk menaikkan pagu indikatif dari 8,07 triliun menjadi 34,7 triliun dan mudah-mudahan Bang Salim beserta kawan-kawan yang di Banggar memperjuangkan ini Pak.

Yang kedua Pak Menteri, terkait dengan data petani, data luas tanam Pak. Ini juga menjadi *problem* pada saat terkait dengan distribusi pupuk. Berkali-kali kami pernah menyampaikan bahwa sumber data itu ada di desa Pak. Ada sensus pertanian, ada BPS, ada penyuluh, ada Babinsa, kita bisa enggak sih mengintegrasikan ya sumber daya pemerintah yang berkaitan dengan pendataan untuk membuat satu data tapi yang berbasis desa. Karena kan, terkait dengan salah salur atau kekurangan pupuk apa segala macam ini kan berawal dari data yang salah, saya yakin. Seperti kemarin saya contohkan data di girik, di sertifikat ya berdasarkan data yang di E-RDCK ini bisa beda Pak, bisa dua kali lipat karena apa, karena juga terkait dengan besarnya subsidi pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk di lapangan. Jadi ada kemungkinan ada indikasi menambah luas tanam untuk mendapatkan pupuk subsidi yang berlebih. Nah sehingga bisa enggak kita bersama-sama ini melakukan pendataan, supaya kita jelas sebelum

misalnya tadi Pak Rahmat dari PT Pupuk Indonesia membuat aplikasi baru membuat iPUBERS sehingga saya sampaikan iPUBERS atau sistem apapun tidak akan berjalan dengan baik kalau basis datanya belum beres. Nah, Pak Menteri punya instrumen tadi kepala desa, penyuluh, Babinsa ya itu bisa digerakkan untuk mesinkronkan data. Nah sehingga mudah-mudahan tahun ini Pak Menteri bisa ke sana paling tidak kita bisa melihat lah *second opinion*-nya dari BPS dari sensus apa namanya pertanian dan sebagainya.

Nah selanjutnya terkait dengan masalah pompanisasi yang disampaikan oleh kemarin Pak Sekjen, Pak Ali Jamil, pompanisasi menjadi prioritas. Permasalahannya banyak saluran yang tidak ada airnya, banyak saluran yang tersumbat, banyak saluran yang dipenuhi eceng gondok. Bapak bisa cek, Bapak sudah lama tidak ke Indramayu Pak. Jadi saya tunggu di Indramayu kabupaten dengan penghasil beras terbesar di Indonesia. Itulah kondisinya, sehingga yang dibutuhkan oleh para petani adalah normalisasi baik saluran-saluran sekunder ya, tersier ya, *long-storied* dan sebagainya, yang biasanya kalau sungai itu bukan kewenangan dari Kementerian Pertanian tetapi kewenangan Kementerian PU. Kalau di Indramayu berarti di bawah BBWS Cimanuk, Cisanggarung. Kadang kala sulit sekali koordinasi dengan mereka. Mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya infrastruktur, mereka yang punya sarana-prasarana sulit kita mengkoordinasikan untuk melakukan normalisasi rutin. Jangankan setiap bulan atau setiap tahun, belum tentu juga. Sehingga Pak Menteri, awal-awal kan pernah membuat apa istilahnya koordinasi kolaborasi dengan PUPR kan, Dirjen PSP dengan Dirjen Air kan kalau enggak salah, SDA kan, Sumber Daya Air. Nah mungkin itu bisa dilakukan lagi kalau bisa punya kantor bersama punya sekretariat bersama tuh dua dirjen itu supaya apa laporan dari bawah itu segera ditindaklanjuti Pak. Kalaupun kita laporan ke balai-balai yang di Cirebon yang di mana gitu kan sulit juga. Nah untuk itu sebelum pompanisasi ini berjalan pastikan saluran itu ada airnya.

Nah yang kedua Pak, di beberapa wilayah di Indramayu juga di Indramayu ada 10 kecamatan di Cirebon mungkin sekitar ada 15 kecamatan yang biasanya kemarau kekeringan, musim hujan kebanjiran, agaknya di beberapa lokasi itu perlu embung perlu embung. Misalnya Pak Ali Jamil di daerah Kapetakan Suranenggala ya Kabupaten Cirebon, itu kan agak jauh dari rentang nih dan kondisinya selalu seperti itu Pak. Sehingga, kemarin saya ke, ke, ke, apa, Kapetakan, desa membuat kolam sendiri membuat kolam sendiri untuk bisa menampung air kalau menghadapi musim kemarau nanti. Eskafatornya dari mana? Dari bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak. Nah sehingga, coba Pak Menteri Pak Ali Jamil coba kita cek kembalilah. Jangan sampai kejadian *El Nino* tahun 2023 kemarin yang Pak Menteri belum jadi menteri Pak ya kita terkaget-kaget ya dan tidak ada persiapan sama sekali menghadapi *El Nino* tersebut. Nah jadi mudah-mudahan tahun ini kita jauh lebih baik penanganannya atau mitigasi bencana kekeringannya dengan memastikan tadi normalisasi dan membuat embung-embung tersebut.

Yang terakhir Pak Menteri tadi sudah kita dengar bersama Pak Menteri sudah menyampaikan *statement* terkait dengan lebih salur salah salur ya yang dibebankan kepada kios kepada petani. Ya kita apresiasi sikap Pak Menteri. Kita pastikan petani jangan dirugikan karena petani adalah pejuang perut untuk manusia yang hidup di Indonesia. *Applause* untuk Pak Menteri.

Mungkin itu saja, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Ini luar biasa loh Pak Menteri, dalam forum Raker Pak Menteri dapat *applause*, ini luar biasa.

Silakan Pak Sulaeman Hamzah.

F-P. NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan segenap Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri, seluruh jajaran dan para mitra yang saya hormati,**

Saya langsung saja dari Fraksi Nasdem menyampaikan beberapa tanggapan, masukan, dan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan realisasi anggaran kementerian tahun anggaran 2024, ini kami melihat realisasi anggaran Kementerian Pertanian 43,74%. Ini di atas rata-rata Pak Menteri, luar biasa dari rata-rata nasional 37,54% akan tetapi masih di bawah angka 50%. Kami juga melihat terdapat dua Eselon I yang realisasi anggarannya masih di bawah 40%, saya sebut saja dari Dirjen PSP dan Dirjen Perkebunan, yaitu sebesar 38,20 dan 35,97%. Hal ini kami mendorong agar Kementerian Pertanian dapat mempercepat penyerapan dan realisasi anggaran yang ada, utamanya untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat.

Yang kedua, terkait dengan progres capaian produksi 2024. Kami juga melihat beberapa komoditas dan kegiatan yang memiliki capaian produksi dan capaian *output* masih kurang dari 40% dibanding dengan target yang sudah ditentukan seperti produksi kedelai 34,35%, aneka cabai, daging sapi, kawasan kelapa, kawasan karet, bahkan *output* untuk pengembangan padi dan irigasi perpompaan baru mencapai 25,49% dan 26,82%. Mohon agar hal ini dapat dijelaskan, capaian yang masih sangat rendah perlu ditingkatkan capaian produksi dan *output* beberapa komunitas masih rendah mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Juni. Apa yang menjadi kendala serta bagaimana langkah-langkah

Kementerian Pertanian untuk mencapai mempercepat capaian produksi dan *output* beberapa komoditas?

Yang berikut terkait dengan pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2025 yang sebesar 8,06 triliun. Ini terjun bebas penurunan drastis atau hanya sebesar 54,74% dari alokasi tahun 2024 14,74 triliun. Tentunya kami sangat menyesalkan perihal tersebut di tengah ancaman krisis pangan, perubahan iklim, rendahnya anggaran produk pupuk bersubsidi, alih fungsi lahan pertanian serta tingginya impor komoditas pangan dalam negeri. Semestinya anggaran yang ada ditingkatkan bukan justru dikurangi. Oleh karena itu kami Fraksi Partai Nasdem mendorong kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025 sedapat mungkin ditingkatkan. Jika kita melihat pagu indikatif per program yang ada, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas turun dari awalnya memiliki porsi sebesar 55,6% di tahun anggaran 2024 menjadi hanya 37,26% di pagu indikatif 2025. Akan tetapi untuk program nilai tambah dan daya saing industri dan program dukungan manajemen porsi atas total pagu justru meningkat dari hanya sebesar 9,7% dan 30,4% secara berurutan pada APBN tahun 2024 menjadi sebesar 20,09% dan 34,48% secara berurutan di pagu indikatif 2025. Mohon hal tersebut dapat dijelaskan dan selanjutnya kami mendorong agar alokasi untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dapat ditingkatkan untuk apa namanya meningkatkan produksi ke depannya.

Yang berikut terkait dengan target produksi komoditas tahun 2025. Ini juga kami melihat dengan menurunnya anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 yang hampir mencapai 50%, kami cermati target produksi untuk tahun 2025 tidak banyak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hanya komunitas jagung yang target produksinya menurun di mana pada tahun 2024 sebesar 22,43%, eh 22,43 juta ton menjadi 16,68 juta ton pada tahun 2025, sedangkan untuk komoditas lain seperti padi, kedelai, jagung, maaf, cabai, kopi, tebu itu cenderung meningkat. Sekali lagi ini mohon dapat dikaji kembali apakah target yang ditentukan realistis dan dapat dicapai di tengah menurunnya anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 akan datang.

Selanjutnya terkait dengan rancangan usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 51,635 triliun yang dibagi untuk program kegiatan reguler sebesar 26,635 triliun dan mendukung Asta Cita presiden terpilih sebesar 25 triliun berupa cetak sawah. Secara khusus, kami menyoroti terkait dengan rancangan usulan anggaran tambahan untuk cetak sawah karena kita lihat pengalaman kita sebelumnya banyak sekali program cetak sawah ini yang terbengkalai dan tidak digunakan. Karena itu, perlu lebih cermat lagi untuk pengawalan terhadap program yang satu ini.

Berikut Pak Menteri untuk terkait dengan banyaknya penggilingan padi. Ini sudah di berita di media masa, penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi. Ini mati banyak ini dikarenakan kalah dengan perusahaan yang besar karena

keterbatasan modal dalam menyerap gabah dan teknologi pengelolaan yang kalah dengan usaha besar. Bagaimana langkah kementerian mengatasi permasalahan tersebut? Karena, penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa ini turut menggerakkan perekonomian di desa. Selain menyediakan lapangan kerja keberadaannya juga turut meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Jika mereka berhenti beroperasi maka karyawannya yang bekerja pun akan ikut diberhentikan. Ini perlu ada cara untuk mengatasi hal ini.

Terakhir Pak Menteri, tentu kami berharap untuk pemerintah betul-betul serius mengatasi masalah pangan karena bagaimanapun kita lihat anggaran semakin hari semakin turun. Tadi dikatakan oleh Pimpinan bahwa pemerintah tidak serius karena ini menunjukkan bahwa program yang satu ini memang perlu ada kerja sama dengan kementerian yang lainnya, khususnya di bidang pangan ini perlu sama-sama menyuarakan ini. Sehingga ke depan kita bisa kembali ke anggaran seperti yang dulu dan kemudian kita bisa melakukan melaksanakan program yang lebih baik lagi.

Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Sulaeman Hamzah.

Pak Daniel Johan, silakan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E., M.M.):

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang cantik, yang tampan, segenap sahabat Anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Terima kasih.

Ada beberapa hal yang pertama adalah tentu hari ini kita melihat kayaknya masa depan petani menjadi suram ya, kedaulatan pangan akan semakin jauh. Dan rasanya kita sedang yang meletakkan fondasi untuk semakin memperbesar impor pangan ketergantungan terhadap luar negeri ya dengan anjloknya anggaran yang

sedemikian besar. Ya kita pernah sangat berhasil membangun pertanian dari bahkan pernah sampai 34 sekarang hanya 22%-nya yang tersisa. Nah sehingga kita mempertanyakan komitmen pemerintah, komitmen, harus disentil juga Ibu Menkeu yang semakin menjauhkan upaya kita betapa pentingnya pertanian. Sehingga kita mendukung upaya Pak Menteri untuk mengusulkan peningkatan agar komitmen terhadap kedaulatan pangan terhadap kesejahteraan petani dilakukan secara konkret oleh pemerintah. Meskipun khusus untuk cetak sawah perlu ada catatan yang mendalam Pak Menteri karena program cetak sawah yang pernah ada itu di saya enggak tahu rasanya di semua dapil juga ditemukan hal yang sama. Di Kalimantan Barat cukup banyak yang akhirnya dia tidak terpakai dan sekarang sudah menjadi ilalang kembali ya. Jadi itu harus benar-benar diantisipasi sehingga tidak menjadi temuan ya. Jadi tentu Fraksi PKB akan mendukung usulan peningkatan, ya kita berharap itu juga bisa menjadi kesimpulan untuk rapat kita.

Yang kedua adalah kita tentu mengapresiasi program pompanisasi tapi sudah disampaikan oleh Bang Ono dan yang lain. Harus agak didetailkan Pak Menteri karena cukup banyak program pompanisasi itu di tempat yang tidak ada air, yang kesulitan air ya, agar pompanisasi ini tidak sia-sia jangan sampai lokusnya salah. Kalaupun agar menjadi efektif dia harus didampingi oleh program yang lain sehingga program embung sumur bor termasuk di Kalimantan Barat cukup masif kita butuh normalisasi. Nah itu menjadi satu paket program keberhasilan pompa air karena pompa air ini sangat penting, tapi itunya airnya sumber airnya enggak ada menjadi sia-sia.

Berikutnya, program, nah *gak* hanya petani yang sedih tetapi peternak juga sedih nih di zaman Pak Menteri karena menjadi hilang program ternak atau Dirjen Ternaknya dihapus saja sekalian. Rasanya sudah *gak* perlu Dirjen Pak, jadi Dirjen Pompa Air saja kalau gitu karena ternak jadi nol. Kita mohon diperhatikan, kita berkhawatir Indonesia akan defisit nih defisit protein, defisit ternak di berbagai daerah di Indonesia ya. Jangan sampai Dirjen Ternak nganggur Pak, kasihan. Di saat makan siang gratis ntar makan apa? *Gak* ada dagingnya sayur doang dan beras *ntar*.

Berikutnya saya mau nitip aspirasi dari banyak kelompok tani yang kemudian dikonfirmasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Pak ya. Pusat mengejar-ngejar dinas untuk. *Hah*, atau mau dioper? Sekretariat, Pak Menteri tolong kuenya di-*double*-kan jangan kopinya doang. Ya jadi saya banyak masukkan dari kelompok tani yang dikonfirmasi oleh kepala dinas pada saat tanya. Pusat sempat nguber-nguber dinas di Kalbar untuk mengumpulkan CPCL dalam konteks bibit padi ya, tetapi begitu CPCL sudah dipenuhi, benihnya malah hilang setengah Pak. Nah, jadi gimana kita produksi mau meningkat kalau benihnya itu, padi, padi ya. Jadi mohon Pak Dirjen ya mohon perhatian kurang dari setengah yang dipenuhi Pak, dikali secara keseluruhan di Kalimantan Barat itu kurang dari setengah dari yang awal-awal pusat mengejar tapi sekarang realisasi malah enggak ada katanya ya.

Sama titip Pak, saya pernah ada percontohan itu tanah Indonesia sudah sangat enggak subur, sehingga selain yang sudah Pak Menteri pikirkan terobosan-terobosan upaya menyuburkan kembali tanah menjadi, ya. Jadi apa yang sudah dicontohkan itu boleh ditiru, jadi sangat penting karena ujung-ujungnya adalah ini menyangkut produktivitas jangka panjang Pak ya. Tanah kita begitu banyak lalu keterbatasan di pupuk saat ini pupuk kimia *support* sehingga secara bertahap tapi pasti menyuburkan kembali tanah tetapi juga mengurangi ketergantungan kimia itu menjadi, saya rasa menjadi penting ya.

Demikian Pak Menteri, terima kasih. Semoga petani kita semakin ada harapan ya dan Komisi IV tentu kita Fraksi PKB siap berjuang bersama kita berjuang di Banggar nanti ya. Kalau bisa kita undang Ibu Menkeu ke sini rapatnya di para petani nanti.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Guntur Sasono.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati, beserta segenap anggota Pak Menpan dan segenap eksekutif dan jajarannya yang kami hormati.

Fraksi Demokrat ingin menyoroti dari sisi anggaran, Pak Menteri. Yang pertama rata-rata serapan anggaran tahun 24 ini 27,45% terhadap pagu indikatif. Satker penyerapan anggaran perlu didorong seperti juga saran dari teman-teman yang lain, sesuai dengan perkembangan global dan musim yang demikian panjang. Kalau tidak segera ada dorongan yang kuat pasti akan terjadi hal-hal yang merugikan kita semuanya ini yang pertama.

Yang kedua pagu indikatif anggaran tahun 25 sebesar 8,7 triliun. Pagu ini juga seperti disampaikan teman-teman yang lain, cukup menurun drastis 54,74% lebih rendah daripada tahun 24. Makanya, saya sepakat dengan Pimpinan tadi dan ini sering saya ucapkan kalau kami turun di masyarakat bahwa pemerintah memang sepenuhnya belum memikirkan tentang bagaimana peningkatan produksi petani dengan beras ini. Ini sungguh cukup rawan Pak Menteri dihadapkan kepada gejolak-gejolak yang akan datang. Harapan kami ada terobosan-terobosan besar selain pompa, selain cetak sawah, ada hal-hal yang

lain yang memang perlu perhatian khusus dari pemerintah.

Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf ini menyoroti dari sisi pengawasan. Saya juga cukup prihatin kita semuanya cukup prihatin kalau melihat siaran media TV yang juga menyangkut mitra ...(*rekaman terputus*).

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Guntur, sebentar.

Ah sudah cukup.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Dari Inspektorat Jenderal 24, ini baru terserap 29% terkecil dari eselon-eselon yang lain. Demikian juga untuk yang akan datang tahun 25, Irjen juga terkecil daripada eselon-eselon yang lain. Menurut saya pengawasan dalam kondisi seperti ini perlu ditingkatkan, Pak Menteri. Ada sasaran 3M (Manusia, Money dan Material). Kiranya dengan saran kami tadi peningkatan pengawasan dan anggaran daripada Irjen lebih bisa maksimal untuk memperbaiki kinerja semuanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bu Saadiah Uluputty, silakan.

F-PKS (Hj. SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pak Menteri beserta jajaran, Pak Sekjen dan Eselon I, Pak Arief Kepala Bapanas, ID FOOD, PT Pupuk Indonesia dan PT Bulog yang saya hormati,

Mewakili Fraksi PKS, saya menyampaikan beberapa hal Pak Menteri yang pertama soal anggaran Pak. Kemarin di Kementerian Perikanan juga saya sudah sampaikan, ternyata di Kementerian Pertanian justru jauh lebih turun lagi ya 54% turun Pak dari kalau 32 turun ke delapan, maka sebenarnya ini Indonesia sebagai negara yang disebutkan harus swasembada pangan itu jauh dari cita kita bersama. Maka, saya waktu itu mengusulkan baiknya kita panggil Bapanas dan

Menkeu untuk duduk bersama bahas seperti apa paradigma mereka untuk bicara tentang pangan kita ini. Selalu pada saat Paripurna pidato Menkeu begitu bagusnya Pak ketika beliau bicara tentang bagaimana keseriusan pemerintah untuk mendorong pangan kita agar tidak jatuh anjlok karena kondisi global Pak, tetapi dalam negeri kita tidak ada perhatian serius.

Kalau kita bandingkan anggaran kementerian yang ada di Komisi IV Perikanan dan Pertanian ini dengan PU dengan Pertahanan dengan Kepolisian, bahkan 50 triliun juga itu belum sampai setengahnya anggaran mereka Pak. Nah olehnya itu sebenarnya masalahnya di mana sih Pak pertanyaannya, atau jangan-jangan memang Kemenkeu dan Bapanas mengevaluasi target-target capaian dari Kementerian Pertanian ini tidak mencapai targetnya Pak. Seperti tadi saya diskusi ya ngomong dengan senior, kalau kita lihat paparan di *slide*-nya Pak Menteri ternyata banyak yang tidak mencukupi target sih Pak. Ini perlu kita evaluasi bersama itu. Kadang-kadang ketika kita Komisi IV ini turun ke masyarakat untuk kunspek ataupun pengawasan reses, Pak Menteri, di lapangan itu masyarakat sampaikan terutama petani Pak, menyampaikan kebutuhan kami di mana, intervensi pemerintah di mana. Saya ambil contoh alsintan Pak Menteri, alsintan-alsintan pertanian, jonda roda 4, cultivator, kemudian *handsprayer* bahkan pompa ataupun alsintan lainnya, coba kita evaluasi Pak. Kadang-kadang hanya digunakan hitung bulan atau tahun setahun dua tahun sudah syukur Pak. Mereka sampaikan bahkan kalau ada kerusakan pun itu tidak mudah diperbaiki Pak, di mana mencari bengkel-bengkel untuk perbaikan alsintan-alsintan ini, begitu. Nah ini evaluasi untuk program.

Dan Pak Ketua saya masuk di beberapa pertanyaan soal kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dan validasi data Pak Menteri. Kalau kita melihat kebijakan pupuk bersubsidi ini, ini harus ada pembenahan basis datanya Pak Menteri. Nah pertanyaannya dari Rapat Komisi IV sebelumnya pembenahan basis data nasional yang valid ini menjadi acuan penentuan E-RDCK untuk menghindari penyelewengan dalam distribusi pupuk. Nah ini spiritnya seperti itu begitu. Nah dalam data yang valid ini kan ada tiga hal, pola tanam, data petani, dan data lahan. Sekarang, bagaimana mekanisme pembenahan data dan basis data nasional untuk penentuan E-RDCK yang valid dan apakah sudah ada *timeline* implementasinya Pak?

Kemudian dengan data yang, ya mohon maaf saya sebutkan tidak valid ya, Pak Menteri ya, alokasi pupuk bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran Pak. Program edukasi kepada petani tentang pentingnya validasi data dapat membantu meningkatkan akurasi data Pak. Nah kadang-kadang ada kebijakan baru ada regulasi baru kurang sosialisasi, Pak Menteri, bahkan kepada petani begitu. Data apa namanya pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi ini kadang-kadang petani menyampaikan kami tidak harus pupuk bersubsidi begitu, beda harga antara pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi memang jauh Pak, yang pertama ya. Yang kedua, kadang-kadang pupuk juga langka Pak di masyarakat. Nah, ya kalau di Jawa saya tidak tahu ya Pak tapi semakin ke timur di Indonesia Timur ini juga

tolong diperhatikan karena kadang persoalan pupuk ini juga bisa mengakibatkan petani-petani kita ya merasa sebaiknya mereka tidak kemudian menanam tanaman pangan yang bergantung kepada pupuk begitu.

Kemudian yang kedua, saya pertanyakan lagi soal pengaruh harga gas terhadap harga pupuk Pak. Nah harga gas bumi tertentu di data kami mengalami penurunan 30% Pak, nah dan otomatis akan berdampak kepada penurunan juga harga pupuk kira-kira begitu kesimpulannya. Nah oleh karena itu, pertanyaannya bagaimana dampak implementasi pupuk berharga gas tertentu ini terhadap biaya produksi pupuk selama ini dan kemudian apakah ada rencana untuk memperluas program HGBT agar mencakup lebih banyak sektor pertanian?

Yang ketiga soal penurunan produksi padi dan jagung, Pak Menteri. Nah luas tanam dan produksi padi serta jagung menurun tajam Pak. Menurut laporan dari Kementerian Pertanian, luas tanaman padi pada periode Oktober 2023 hingga Februari 2024 hanya mencapai 5,4 juta hektar, menurun 1,9 juta hektar dibanding periode yang sama pada 2015-2019. Periode ini berdampak langsung pada produksi pangan nasional dan meningkatkan risiko kekurangan pasokan. Penurunan produksi mengakibatkan kebutuhan nasional otomatis tidak tercukupi, sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Produksi beras pada tahun 2023 hanya berkisar 30 hingga 31 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 34 juta ton dan kekurangan pasokan ini menyebabkan kenaikan harga pangan di pasar domestik yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Apa langkah konkret yang diambil pemerintah untuk meningkatkan luas tanam dan produksi padi serta jagung yang menurun ini Pak Menteri, selain mungkin Pak Menteri lagi gencar-gencarnya. Saya lihat setelah dari menteri kemarin ke Pak Menteri yang baru, kami memberikan apresiasi untuk lebih memperhatikan padi tanaman pangan khusus peningkatan produksi.

Dan Fraksi PKS juga memberikan catatan untuk masalah alih fungsi lahan pertanian. Laju alih fungsi lahan pertanian yang tinggi menyebabkan penurunan produksi pangan di Indonesia. Dan menurut data Bapanas luas tanam padi menurun tajam dari 7,4 juta hektar menjadi 5,4 juta hektar sebagaimana tadi saya sampaikan. Dan oleh karena itu, maka harus ada langkah-langkah yang memberikan insentif kepada petani yang memperhatikan lahan pertanian dan penalti bagi mereka yang melakukan alih fungsi lahan. Begitu pun harus ada kerja sama pemerintah pusat dan daerah, Pak Menteri, agar ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah distribusi pupuk bersubsidi dan masalah-masalah lainnya menyangkut juga dengan E-RDKK.

Yang berikutnya soal perlu peningkatan penyuluh pertanian Pak Menteri. Kami memberikan catatan soal peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian ini harus diperhatikan untuk membantu memahami penggunaan pupuk yang efisien kepada masyarakat ataupun bimbingan lainnya. Nah kami punya catatan Pak Menteri, salah satu cara mengatasi hama dan penyakit tanaman

pertanian ini juga yang sering dikeluhkan oleh petani baik tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan, saya selalu sampaikan Bapak-bapak Dirjen mohon ada perhatian, satu penyuluh pertanian rasio antara penyuluh dan petani satu berbanding seribu Pak. Artinya apa, jika ada kondisi satu areal terkena hama baik tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan, petani susah untuk mencari penyuluh, nah ini juga catatan.

Yang terakhir saya memberikan satu catatan terakhir, *stressing* Pak untuk tanaman perkebunan Pak, kebetulan saya mewakili dari dapil Indonesia Timur yang komoditi perkebunannya menjadi komoditi ekspor ya Pak. Nah dalam data, nilai ekspor pertanian 91% berasal dari dari sub-sektor perkebunan, kira-kira begitu ya Pak Dirjen Perkebunan ya, untuk kelapa sawit, pala, cengkeh kopi Pak Menteri saya memberikan atensi dan permintaan sungguh-sungguh untuk tidak saja memperhatikan tanaman pangan tapi juga tanaman perkebunan. Maka, saya cukup miris Pak ketika kemarin petani sudah mengurus, Pak Ali Jamil CPCL-nya sudah untuk jalan usaha tani ke sentra-sentra perkebunan, tetapi dihapus semua Pak. Pertanyaannya kenapa dihapus Pak? Ini kebutuhan yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga alat pasca-panen Pak, alat pasca-panen kita selalu mengeluh soal ada bakteri, apa namanya, aflatoksin dan lain-lain sebagainya dipulangkan hasil-hasil perkebunan kita ketika ekspor ke negara-negara tujuan karena ada persoalan di sini tetapi kita tidak memperhatikan membantu petani soal alat-alat pasca-panen Pak. Nah ini saya minta Pak Menteri di Pak Menteri yang baru orang timur juga Pak, tolong perhatikan Pak.

Terima kasih Pak Ketua.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk mengefektifkan waktu saya langsung masuk ke pendalaman dan mohon untuk tidak terlalu berpanjang-lebar dan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari perwakilan fraksi.

Saya mulai dengan Pak Hanan Rozak, lalu berikutnya Pak Firman Subagyo, dan terakhir Pak Hermanto.

Silakan Pak Hanan.

F-P. GOLKAR (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri dan jajaran Eselon I,
Kepala Bapanas yang saya hormati,
Dirut Bulog, Dirut ID Food yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati, saya cintai, saya
banggakan.**

Pertama terkait dengan adanya laporan dari BPS bahwa ada penurunan, diperkirakan ada penurunan luas tanam yang kaitannya dengan luas panen padi seluas 3,83 juta hektar atau 36%. Ini kalau saya coba konversi ke gabah kering panen yang akan dihasilkan 19 juta lebih, kalau kali 5 ton berarti 19 juta. Konversi ke beras sekitar 10 juta ton beras, kalau itu tidak bisa kita tanggulangi dari bulan Mei sampai bulan Desember. Sedangkan kemarin saja 2023 kita sudah mengimpor 3 jutaan ton beras. Artinya apa ini sangat serius Pak Menteri. Kondisi ini sangat serius bagaimana kita bisa menutupi kekurangan luas tanam itu di tahun-tahun 2024 ini. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Menteri saya sangat setuju, namun harus benar-benar melihat potensi air Pak. Jadi kaitan dengan pompanisasi itu sudah benar karena kami ada di lapangan, kami sering menerima harapan masyarakat terkait dengan pompanisasi. Namun harus benar-benar selektif dan dipastikan bahwa kita bisa menutupi kekurangan 3,83 juta hektar itu Pak, di mana tempatnya, lokasinya di mana, provinsi apa, kabupaten apa, bahkan sampai di desa mana. Sehingga kita bisa memastikan kita bisa menyatakan bahwa 2024 ini kita aman atau sudah kita buat *statement* bahwa kita hanya bisa mencapai kalau ditargetkan 55 juta ton ya berapa yang bisa kita capai, sehingga bisa diambil keputusan-keputusan yang benar-benar bisa menanggulangi persoalan yang kita hadapi. Ini sangat serius Pak Menteri.

Kemudian yang kedua selain dengan pompanisasi dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Saya kira ini perlu waktu Pak Menteri rehab ini, jangan-jangan kita melakukan rehab tetapi tidak bisa termanfaatkan di 2024. Tolong ini dilihat lagi. Kalau optimalisasi lahan rawa saya sangat setuju, karena apa sesungguhnya air itu ada manakala kemarau air itu ada, namun air lebih rendah dari permukaan sawah. Bedanya ya paling satu meter mungkin dengan pompa aksial itu bisa kita atasi terkait dengan bagaimana di musim kemarau lahan-lahan rawa bisa tanam.

Kemudian kaitan dengan optimalisasi waduk bendungan. Nah ini juga tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu singkat. Teknologi budidaya hemat air ini mungkin yang di lahan kering, kemudian gerakan panen air hujan. Ini tolong dijelaskan ini Pak apa gerakan ini, dalam bentuk apa? Saya kira ini serius, kalau kita tidak bisa mengatasi persoalan ini kalau yang lalu kita mengimpor 3 juta saya khawatir akan lebih besar lagi kita mengimpor beras di tahun 2024 ini untuk menutupi kekurangan itu.

Kemudian terkait dengan yang 2025. Pak Menteri sudah, Kementerian Pertanian sudah membuat target-target terkait padi 56,05 juta ton, jagung 16,68, kedelai 334 ribu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini pertanyaan saya ini bisa

tercapai mana kala APBN di Kementerian Pertanian itu berapa, Pak? Apakah sama seperti tahun lalu misalnya di angka 17 triliun atau seperti apa? Nah sementara kita dialokasikan oleh pemerintah di Kementerian Pertanian 8,06 triliun tapi targetnya masih tetap. Tidak, saya tidak, kita diinformasikan kalau seandainya benar-benar terjadi hanya 8,06 triliun ini dampaknya terhadap capaian kinerjanya seperti apa. Untuk itu saya minta Pak Menteri membuat skenario Pak, skenario pertama senario normal dengan target produksi padi misalnya 56,05 juta ton berapa itu dukungan APBN-nya. Kemudian seandainya di angka 8,06 triliun artinya kita tidak ada anggaran tambahan itu seperti apa? Misalnya kita target kita cukup 30 juta ton misalnya kan sehingga kita harus impor nah seperti itu. Saya kira ini perlu disajikan, begitu juga manakala apa yang diusulkan itu disetujui pemerintah anggaran tambahan sebesar 34,7 triliun ini targetnya bisa seperti apa? Apakah hanya tetap di 56 apakah sudah bisa mencapai misalnya 65 juta ton, khususnya untuk padi? Ini saya kira ini perlu dijelaskan supaya kawan-kawan di Badan Anggaran kemudian di Kementerian Keuangan bisa melihat ini secara realistis dampak daripada alokasi anggaran di Kementerian Pertanian.

Saya kira ini Pak Menteri, dari saya sedikit saja. Kembali lagi yang 2024 ini sangat serius, apakah kebijakan yang sudah diambil terkait dengan pompanisasi itu sudah cukup atau dengan langkah-langkah lain, sehingga kita bisa memenuhi target-target itu.

Ini sebagai gambaran Pak Menteri, saya kebetulan sering ada di lapangan ada yang menarik Pak Menteri. Petani-petani singkong ya, yang panen-panen di bulan Agustus pada saat masuk musim hujan mereka ini sekarang cenderung menanam padi gogo ya, untuk menutupi kekurangan tadi. Maksud saya, apakah bisa kita genjot dengan padi gogo manakala air mencukupi? Mereka bibitnya menggunakan bibit hibrida, contoh bibit mapan Pak, ternyata hasilnya sudah teruji beberapa kali tanam sudah bisa 6 ton, Pak. Nanam padi gogo di lahan kering ya, tapi ada airnya musim hujan atau dengan sistem pompanisasi yang kita lakukan, itu bisa sampai 6 ton Pak, ada contoh-contohnya Pak, menggunakan bibit hibrida yang seharusnya ditanam di sawah mereka tanam di lahan kering. Jadi akan menggeser komoditi-komoditi lain misalnya singkong yang harusnya ditanam di bulan September atau Oktober, dia geser tiga bulan setelah itu baru tanam singkong. Awal musim hujan dia tanam padi gogo. Ini saya kira cukup potensial untuk menutupi kekurangan tadi Pak yang cukup banyak itu.

Saya kira ini dari saya terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Pak Firman silakan.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Ibu Pimpinan.

**Ibu Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajarannya,
Kepala Badan dan para Direktur Utama dari mitra kerja yang saya hormati,**

Pertama saya ucapkan selamat Pak Menteri karena Pak Menteri kembali lagi untuk kagetnya mau berkotor-kotor lagi karena spirit semangat daripada pertanian ini harus berani kotor Pak. Ini persis seperti yang saya sampaikan ketika Pak Menteri yang lalu jadi kalau mau jadi Menteri Pertahanan Pak harus siap kakinya kotor. Kalau kakinya bersih enggak bakal bisa menyelesaikan persoalan.

Pak Menteri yang saya hormati,

Saya memberikan apresiasi terhadap apa yang telah Bapak sampaikan secara jujur dan kemudian secara transparan terbuka. Kami menyadari tentunya Pak Menteri ini dalam posisi kembali lagi menerima jabatan di Kementerian Pertanian ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa, karena Bapak datang ke situ bukan mencuci piring, tapi membersihkan WC Pak yang lebih besar daripada piring. Ini isu yang berkembang di lapangan seperti itu. Oleh karena itu yang saya berikan apresiasi adalah Bapak ini telah mewakafkan kembali dirinya untuk terjun ke pertanian itu adalah untuk menyelamatkan nasib bangsa ini. Kita sadar bahwa pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat fundamental, bahkan di PBB sendiri sudah merilis pangan adalah hak asasi manusia. Konstitusi kita itu juga sudah menyatakan sandang, papan, pangan tersedia oleh negara. Hanya persoalannya adalah di lembar 5 dan lembar 6 ini setelah Bapak laporkan secara jujur dan terbuka, ini kami prihatin karena progres capaian produksi 2024 itu tidak tercapai secara maksimal. Persoalannya kami tidak akan menyalahkan Pak Menteri karena Pak Menteri baru tiga bulan empat bulan di situ.

Dan kedua juga progres capaian *output* 2024 juga mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Di mana yang salah? Ini tentunya Bapak-bapak yang harus konsolidasi dengan internal karena yang disebelakirikan kan kecuali Pak Setyo ya karena Pak Setyo kan pendatang baru ini, yang lainnya pendatang lama semua Pak. Harusnya pendatang lama ini harus bisa memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap tidak tercapainya daripada apa yang ditargetkan oleh kementerian. Ini kejujuran, oleh karenanya Pak Menteri supaya kerja dalam untuk mencapai rencana kerjanya itu didasari oleh data yang betul-betul akurat. Oleh karena itu Pak Menteri, saya mohon Pak Setyo ini supaya difungsikan secara maksimal anggarannya kalau bertambah untuk memberikan audit baik internal

mungkin sekali-sekali juga eksternal, untuk melihat di luar seperti apa di dalam seperti apa, jangan Pak Setyo dikurung di dalam saja tapi di luar enggak tahu. Anggarannya diberi yang cukuplah kalau enggak cukup yang wajar, sehingga Pak Setyo ini supaya bisa lebih leluasa untuk membantu Bapak dalam masalah fungsi pengawasan.

Nah oleh karena itu Pak evaluasi ini menjadi penting karena ini dalam rangka untuk menentukan langkah kerja berikutnya. Saya sepakat dengan Bu Saadiah tadi, tanpa adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan ini sulit kita untuk bisa mencapai target-target yang telah kita rencanakan. Nah ini yang mungkin saya khawatir tadi saya bincang-bincang sama teman kanan-kiri, jangan-jangan ini nanti usulan Bapak tambahan anggarannya begitu besar, tidak disetujui oleh Bu Mentan karena Bu Mentan hanya melihat dua lembar ini. Dikasih segini saja tidak tercapai apalagi dikasih tambahan. Padahal Bu Menteri mungkin tidak melihat Pak Amran beda dengan yang sebelumnya walaupun sama-sama satu pulau kan begitu. Nah ini harapan saya seperti itu. Nah oleh karena itu Pak ini penting data itu adalah menjadi bagian penting dalam rangka untuk rencana kerja berikutnya.

Dan kedua Pak, kalau kita mau mengevaluasi secara menyeluruh bahwa biaya produksi pertanian terbesar itu kan di energi. Kalau enggak salah Pak Dirut ini mungkin pada tahu ya hampir 70% ya itu untuk energi, 60% untuk biaya-biaya lainnya. Nah oleh karena itu Pak, saya sepakat bahwa kita jangan latah ya dengan adanya hilirisasi. Hilirisasi ini sebetulnya nanti saja lah, huluisasi ini yang diutamakan. Bagaimana kita melakukan rangka kerja dari atas sampai bawah, bagaimana menyinergikan dari sekian kementerian itu untuk betul-betul melaksanakan tugas fungsi pokoknya yaitu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ketahanan pangan untuk menuju kedaulatan pangan sehingga pangan ini akan tersedia. Nah kalau kita lihat ini posisi ini belum pernah dilakukan. Oleh karena itu Pak, ada satu gagasan yang menarik karena ini saya juga heran pemerintahan ini kan sedang menyusun namanya RUU RPJP 2004-2045, yang di situ adalah akan menuju Indonesia Emas. Yang saya khawatirkan, kalau RJPN ini tidak dibedah yang akan menghasilkan, yang akan dihasilkan nanti adalah perak Pak bahkan mungkin perunggu bukan emas. Karena apa, di situ setelah saya baca di Baleg itu Pak sama sekali yang namanya sektor pangan tidak tersentuh Pak. Bagaimana kita bisa mandiri, bisa berdaulat kalau di RPJP saja itu tidak tersentuh? Apakah kita bangsa yang jumlah penduduk besar ini akan bergantung kepada ketersediaan dan keterjangkauan yang berasnya itu dari luar negeri. Saya rasa ini tidak bisa ditolerir lagi Pak, ini kerjaan berat. Oleh karena itu, harapan kami Pak mudah-mudahan Pak Menteri kita doakan bisa melanjutkan 5 tahun yang akan datang dan ini bisa menyelesaikan persoalan. Itu doa kami Pak, doa kan boleh ya, apalagi sebagai teman yang sudah lama di sini. Nah oleh karena itu Pak ini yang dia harus menjadi perusahaan.

Kemudian regulasi Pak, kemarin juga kami singgung seperti pupuk kenapa enggak dibikin penyederhanaan saja ada regulasi pupuknya hulu sampai hilir,

sehingga produsen ini juga jangan berbenturan terus dengan para distributor dan dengan para petani. Padahal sekarang pupuk ini Pak, di gudang melimpah tapi karena ada sistem tadi yang sampai sekarang ini masih antara iPUBER, Kartu Tani, i-PUBER, Kartu Tani ini menjadi kendala. Sudahlah putus saja mana yang terbaik itu diputuskan. Kalau Kartu Tani itu memang tidak bagus putus sehingga ada *single, single* atau satu ketentuan menggunakan KTP, i-PUBER itu saja dan disosialiskan terus-menerus ini. Nah kemudian tentang regulasi ini Pak untuk bagaimana menyatukan terhadap kebijakan-kebijakan yang melibatkan berbagai sektor. Bagaimana kita belajar dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Kita bikin *Omnibus Law* khusus pertanian sehingga nanti Bapak punya duduk bersama-kebersamaan antara kementerian lembaga satu yang lain untuk menuju satu tujuan yaitu tercapainya negara yang berdaulat masalah pangan dan kemudian Bapak sebagai *commander*-nya di situ. Ini luar biasa Pak kalau memang kita mau punya niat dan *nawaitu*.

Dan berikutnya Pak juga mengenai masalah lahan Pak. Kita ini sudah punya regulasi yang sangat banyak sekali, yaitu mengenai masalah lahan produktif Pak. Lahan produktif kita ini Pak, nyaris Pak, yang namanya lahan pertanian lahan irigasi tani Pak sudah dialihfungsikan semua menjadi yang namanya pabrik, perumahan, rumah sakit dan sebagainya. Nah ini yang perlu juga diambil tindakan tegas. Pak Setyo mungkin jagonya yang beginian. Ini harus ada tindakan tegas Pak. Sesekali saya menginginkan ada bupati kepala daerah yang dipenjara Pak gara-gara mengalih fungsikan lahan Pak. Kita kalau pulang kampung Pak nangis Pak, pada waktu saya kecil tahun 1965 Pak itu daerah saya itu pinggir jalan raya itu Pak semua pertanian. Tebu luar biasa pertanian padi luar biasa sekarang Pak sudah jadi industri semuanya, tetapi nyaris tidak ada tindakan hukum, ke mana aparat hukum ini? Nah ini mohon ditegakkan kembali. Enggak ada gunanya kita itu menyetak lahan pertanian 1 juta di luar daerah tapi yang *existing* saja enggak diperhatikan, yang *existing* dialihfungsikan itu dibiarkan. Nah ini posisi-posisi Pak yang di secara menyeluruh.

Oleh karena itu Pak, kami berada betul dengan Bapak-bapak dan timnya ini saya masih berikan spirit lah kepada Eselon I, *Insyallah* kalau Bapak bisa memperbaiki dalam waktu pendek ini, kalau Pak Amran nanti duduk di situ kembali kan juga akan terakomodir kembali kalau berhasil karena ini kan *teamwork*. Ya walaupun enggak menjanjikan ya Pak Amran ya? Tapi, saya yakin Pak Amran akan memilih teman-teman yang kinerjanya baik akan diakomodir. Saya rasa ini penting untuk ke depan karena di ruangan inilah sebetulnya kita mendiskusikan masalah ini bukan masalah Kementerian Pertanian saja tapi masalah kita bersama, masalah bangsa. Oleh karena itu, tidak ada yang saling menyalahkan, tapi ayo coba kita bedah kita *udari* kemudian kita perbaiki secara bersama-sama. Dan, harapan kami juga para kementerian mau mendengarkan terhadap apa yang kita sampaikan.

Berikutnya Pak yang terakhir, mohon juga Pak Menteri supaya ini petani ini secara psikologis ini bergairah Pak. Sekarang petani-petani muda Pak, saya itu

paling alergi Pak mendengar petani milenial Pak, termasuk orang yang paling enggak suka petani milenial, petani muda saja lah yang mudah-mudah dikenal. Kita jawabnya susah Pak, "Petani Milenial itu apa sih Pak?" kalau petani tanya.

Nah ini juga mulai Pak, program-programnya Bapak lakukan sudah bagus, tapi ada juga yang keputus tengah jalan, katakan seperti program UPO (Unit Pengolahan Pupuk). Itu sudah memproduksi pupuk Pak, tetapi ketika sudah menjadi pupuk Pak, mereka itu sulit untuk mendapatkan izin lab, sulit untuk mendapatkan izin edar. Kalau ini diberikan izin oleh pemerintah, negara hadir di situ, maka ini juga akan membantu ketersediaan pupuk-pupuk yang dihadapi masyarakat selama ini. Karena kemarin kita diskusi tentang pupuk kan dari Pak Dirut menyampaikan birokrasinya terlalu panjang. Dan kedua Pak regulasi pupuk Pak, saya prihatin kemarin Bapak pernah menyampaikan pada waktu kunjungan hanya ada beberapa kepala dinas yang hadir, ini kan memprihatinkan, ini menteri yang hadir. Nah kalau seperti ini Bapak datang enggak diperhatikan, kenapa kita kasih kewenangan, cabut saja Pak, cabut saja kita setuju. Sekarang CPCL itu Pak, kepala desa pun ikut tanda tangan. Ketika rakyatnya kelompok tani yang betul-betul petani dan itu bukan pendukungnya Pak, minta tanda tangan kepala desa susah Pak. Regulasi-regulasi seperti ini Pak yang diprioritaskan dan kemudian dikedepankan dan kemudian diperbaiki. Nah ini ini tentunya masukkan.

Kemudian penggunaan pupuk-pupuk yang produk masyarakat Pak, ini juga menjadi bagian kemudian program-program Pak, yang betul bermanfaat bagi masyarakat Pak, seperti jalan usaha tani, kemudian irigasi. Ya ini irigasi memang masih *problem* Pak, karena irigasi ini kan hulu hilir. Ketika primer sekundernya itu tidak dibangun ya kewenangan pertanian ini menjadi mubazir karena di tersiernya itu kan di ujung, jadi enggak ada enggak ada, enggak ada perbaikan. Nah oleh karena itu, perlunya tadi revisi Undang-Undang Pertanian secara menyeluruh dengan menggunakan metode *Omnibus Law* itu menyatukan satu kesatuan, sehingga semua komando yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian itu di bawah komando Kementerian Pertanian, mau PU mau dan lain-lain sebagainya mengikuti apa yang menjadi rencana kerja daripada Kementerian Pertanian.

Jadi ini Pak yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Dan jalur usaha tani Pak itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan *combine* dan sebagainya, walaupun *combine* juga penting. Karena saya sering ngirim ke Pak Dirjen, Pak Sekjen juga saya kirim, semua dirjen saya kirim, bagaimana para ibu-ibu yang dulu katanya ke sawah itu jalan kaki saja kayaknya kotor, dengan jalan usaha tani Pak sekarang dia bisa naik motor Pak. Yang saya betul-betul agak merinding itu Pak, dia mengatakan ketika jalan ini belum dibangun oleh Kementan Pak, dengan program dari Bapak-bapak ini, kami ngangkut hasil pertanian itu satu karung pakai motor roda dua yang dibikin trail itu Pak, satu karung itu 8.000 Pak, satu karung 8.000 dari sawah sampai pinggir jalan besar. Dengan adanya jalan yang Bapak berikan ini sekarang bisa pakai roda tiga, roda tiga itu Pak bisa ngangkut 10 sampai 20 karung, bayangin penghematan biaya itu dan itu dirasakan betul oleh masyarakat. Oleh

karena itu Pak, program-program yang seperti ini saya rasa masih perlu dipertahankan dan harapan kami Pak Menteri tentunya kami akan siap mendukung secara politik selama Bapak masih pada posisi apa yang kita harapkan. Dan, kami terus akan bersama-sama untuk memperbaiki terhadap regulasi.

Dan mohon Pak RPJP, Bapak segera bentuk tim mumpung ini belum dibahas di Baleg karena sudah ada penugasan. Tolong berikan masukan tentang pentingnya adalah tentang pentingnya kedaulatan pangan tadi Pak, karena tidak kesentuh sama sekali, energi juga tidak kesentuh sama sekali. Jadi ini yang perlu mendapat perhatian dan pernah saya cek ke Bappenas, salah satu tim yang Bapak kirim ke sana itu juga mengatakan Pak kami sudah berkali-kali memberikan usulan tapi rupa-rupanya Bappenas itu Pak banyak orang yang lebih pintar daripada pertanian, kira-kira seperti itu, jadi artinya bahwa ego sektoral. Nah ini mungkin Bapak bisa menjadi masukan mudah-mudahan ini akan menjadi jalan keluar untuk perbaikan dan *insya Allah* 5 tahun ketika Bapak di sana, minimal bisa lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya walaupun yang lalu Bapak sudah cukup baik, hanya ada tsunami sedikit, ayo tsunami ini kita perbaiki kita bangun kembali dengan kebersamaan.

Demikian Pak Menteri, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Pak Firman ini senior memang beda Pak Menteri, lengkap, komprehensif.

Menyambung tentang yang disampaikan Pak Firman tentang alih fungsi Pak Menteri, memang kita ini setiap tahun lahan pertanian itu berkurang hampir seratus ribu hektar dan itu bahaya, itu bahaya, segala macamlah dengan alasan PSN, bandara, jalan tol, apapun lah. Itu pun juga untuk kepentingan masyarakat juga tetapi memang harus ada jalan keluar. Tadi yang disampaikan Pak Menteri cetak sawah itu mungkin salah satu jawaban juga, untuk bisa karena kita belum cetak sawah dan memang diperlukan tentu dengan catatan-catatan tertentu pasti.

Pak Hermanto, silakan Pak Hermanto, sudah makan siang belum Pak Hermanto?

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini sudah habis nih Mbak ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Oh sudah habis, takutnya kalau belum makan siang sebentar saja, keburu lapar nanti.

Silakan Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan, anggota, Bapak Menteri, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Karantina,

Saya singkat saja karena yang lain sudah bicara hampir rata-rata 15 menit.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Enggak boleh iri, Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Engga lah, kita ini guyon saja, apalagi ada Bang Salim ini. Ya karena ini enggak ada Pak Sudin, jadi kayaknya *plong* ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Ngaku ya.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bukan, bukannya saya, Pak Firman juga puas tadi itu, keluar itu intelektualitasnya itu.

Baik, terima kasih ya saya ingin cepat saja. Pertama, saya ingin katakan bahwa angka anggaran yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi adalah 8,06 triliun. Itu adalah angka yang terendah dalam tren anggaran Kementerian Pertanian dan itu tidak hanya Kementerian Pertanian, itu juga terjadi mitra Komisi

IV yang lain. Walaupun demikian, Komisi IV itu selalu mendorong untuk penambahan, sayang sekali itu kementerian itu tidak meresponnya dengan baik selalu ingin bertahan seperti itu saja. Nah tadi suara dari Anggota sudah meminta supaya angka 8,6 triliun itu minta ditingkatkan. Kemudian saya ingin katakan bahwa angka sebesar itu pertanyaan apakah bisa mencapai target dan program yang disampaikan oleh Pak Menteri, sementara yang sebelum-sebelumnya jumlah anggarannya itu mencapai 15 triliun itu kita juga sudah kembang-kempis.

Nah saya ingin melihat dalam perspektif ekonomi saja, bila terjadi penurunan anggaran itu menandakan bahwa terjadinya pengurangan atau penurunan daya beli pemerintah dan efeknya luar biasa. Itu akan menurunkan juga daya beli petani karena sebagian besar daya beli petani itulah didukung oleh anggaran. Nah saya khawatir juga, dengan turunnya daya beli petani itu akan mengurangi pula jumlah produksi petani kita. Nah saya berharap kejadian pesimistis itu tidak terjadi dengan angka yang rendah ini, cuman saya ingin hanya mengingatkan saja bahwa di tengah rendahnya anggaran kita ini, daya beli petani rendah, kemudian dalam waktu bersamaan faktor-faktor produksi sektor pertanian itu mengalami kenaikan. Biaya tenaga buruh tani, pupuk, kemudian juga irigasi, air, alsintan segala macamnya ya kan yang di mana itu adalah sifatnya sewa itu pun juga mengalami kenaikan. Nah saya pikir dengan rendahnya anggaran pertanian ini itu akan memukul ya daya beli petani kita. Nah atas dasar itulah saya minta supaya kementerian mendorong kembali walaupun di situ tambahannya adalah 25, ya kan, tapi saya pikir ini perjuangannya tidak sederhana ya kan. Apalagi di Banggar itu saya sulit sekali memprediksi apakah setiap Anggota di Banggar itu bisa menyuarakan ini, ya kan. Kecuali, Pak Menteri rapat di Rakortas sana bicara secara lantang bahwa ini adalah sektor yang berkaitan dengan hidup mati bangsa, bahwa pangan ini adalah sektor hidup mati kita. Kalau misalnya kita telat saja memberi makan pada bangsa ini, Pak Menteri tanggung jawabnya adalah 275 juta jiwa Pak Menteri, ya kan. Jadi bukan kita hanya memikirkan petani saja tapi memikirkan non-petani yang butuh pangan begitu. Nah saya pikir 8,06 triliun ini tidak memadai buat memenuhi target-target program yang dicanangkan oleh Pak Menteri.

Nah sisi lain saya juga menyampaikan apresiasi atas program yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk merespons anggaran sebesar itu ya. Ya di situ disebutkan ada pompanisasi lahan, sawah tadah hutan, kemudian rehabilitasi jaringan indikasi tersier, dan ada 6 program di situ. Kalau Pak Menteri fokus di sini saja dengan anggaran sebesar ini, saya juga khawatir apakah kita bisa ya kan memenuhi pangan nasional kita. Jadi, saya apresiasi tapi saya ingin tambahkan Pak Menteri, pompanisasi lahan sawah tadah hujan ini juga bagaimana kita memperbaiki juga embungnya dan Pak Menteri sudah sangat bagus menyatakan bahwa nanti akan terjadi musim kekeringan atau *El Nina* nanti akan terjadi, *El Nino* ya, *El Nino* dan itu akibatnya adalah terjadi kekeringan air akan kurang di situ. Nah saya pikir untuk saat ini selain dari pompanisasi juga memastikan bahwa ada embung-embung yang harus diciptakan untuk menampung air yang saat ini ada.

Kemudian terakhir Pak Menteri, saya melihat ini ada Asta Cita presiden terpilih. Asta Cita Presiden terpilih anggarannya adalah 25 triliun. Nah ini juga tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri ada kaitannya juga dengan soal ketersediaan pangan, ya kan. Saya punya prinsip sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan kita orientasinya itu adalah kedaulatan pangan. Saya minta juga supaya ada perbaikan *mindset* dari sektor pertanian ini. Kalau ketersediaan ini, kami waktu membahas Undang-Undang Pangan ini bersama Pak Firman waktu itu kita lebih cenderung kepada kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan itu artinya membuka peluang yang penting pangan itu ada, persoalan dia datang dari petani atau bukan dari petani urusan lain.

Nah oleh karena itu saya minta perhatian sekali kepada Pak Menteri dan juga Pak Badan Pangan, fokus kita memprioritaskan produk-produk pertanian dalam negeri untuk memenuhi apa yang kita sebut Asta Cita itu. Nah saya juga ingin mendalami apa sih yang dimaksud dari Asta Cita yang tercantum di sini, seperti yang misalnya semoga ini bisa menjadi persoalan pembahasan kita secara detail ya kan. Dulu kita juga ada *Food Estate* ya kan, *Food Estate* itu ya setiap kita bahas di sini ya itu tidak memberikan informasi yang jelas tentang perkembangannya. Nah saya khawatir juga nanti bila ini tidak secara detail dan strateginya tidak jelas buat kami di Komisi IV, ini juga akan mengkhawatirkan begitu, begitu Pak Menteri. Kami juga ingin mendapatkan penjelasan ini kan jumlahnya besar ini dibandingkan dengan reguler kita.

Demikian Bu Ketua dan Pak Ketua, Pak Menteri, Pak Badan Pangan.

Terakhir saya juga begini.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Oh masih ada terakhir?

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Satu lagi terakhir terkait dengan isu *demurrage*, ya kan. Saya enggak saya ini ditanya oleh wartawan, ditanya oleh publik, saya sekarang ini masih menahan Pak ya kan. Saya juga belum bisa jawab ya kan, *demurrage* yang ada sekarang ini itu bagaimana cara menjelaskannya itu bisa terjadi? Saya mungkin ini Badan Pangan yang bisa menjelaskan. Saya, oh Bulog ya, iya nanti silakan saja yang penting kami mendapatkan penjelasan itu supaya kita juga jelas duduk masalahnya *demurrage* ini.

Demikian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Walaikumsalam.

Bu Endang silakan.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Baik

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Ibu, Bapak Ketua yang saya banggakan,
Pak Menteri beserta jajarannya dan beserta semua Dirut yang saya banggakan pula.**

Pak Menteri, saya hanya ingin sedikit saja, tadi dikemukakan oleh Pak Firman dan Pak Hermanto sudah komprehensif. Saya hanya ingin menambahkan untuk mengantisipasi tadi kedaulatan pangan kita apalagi dengan Program Gizi Baik dari Bapanas, saya hanya mengingatkan Pak Menteri semoga ini jadi PR yang memprioritaskan program Pak Menteri di tahun 2025, yaitu tentang potensi keanekaragaman hayati kita Pak yang nomor dua di dunia, tapi sayang sekali Pak, Bank Genetik kita yang ada di Bogor itu terbengkalai Pak. Jadi saya hanya mengingatkan Pak Menteri bagaimana mengkoleksi kembali keanekaragaman hayati kita terutama untuk potensi-potensi lokal yang berdasarkan spesifik lokasi itu dimanfaatkan Pak. Karena sayang sekali Pak saya dulu ikut merintis bagaimana keberadaan Balai Biogen itu, tapi sekarang terbengkalai Pak. Selain tidak ada penelitinya juga tidak ada variatif genetiknya, jadi hanya ada talas dan sedikit kacang tanah Pak, itu pun dari peneliti-peneliti yang senior yang sudah lama meninggalkan penelitiannya.

Nah jadi Pak Menteri untuk kedaulatan pangan kita tentunya harus punya Bank Genetik Pak, kalau tidak kita akan tergantung dengan impor. Nah keanekaragaman hayati kita perlu didukung Pak, nah apalagi tadi ada visinya Pak Presiden yang baru, tentunya Bapak sudah menghayati, bagaimana untuk mempertahankan gizi masyarakat kita. Nah kalau genetiknya tidak kita manfaatkan dengan baik yang ada di lokal-lokal kita Pak, kita akan selalu mengimpor konsumsi dari luar negeri. Nah ini yang sangat saya khawatirkan Pak, mudah-mudahan Pak Menteri punya *political will* yang kuat dan punya *grand strategy* yang kuat sehingga ganti menteri pun akan menjalankan itu dengan baik.

Terima kasih Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Enggak ganti kok Bu.

Baik, Bapak-Ibu sudah tidak ada ya?

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bu, sedikit tambahan boleh Bu? Sedikit saja Bu saya *ndak* kayak Hermanto Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Tolong sedikit saja ya Bang Salim.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Oke saya lanjut Pak Menteri.

Tadi menarik apa dikatakan senior kami Pak Firman masalah E-RDKK. Saya kira kebersamaan Pak Menteri dengan Panglima TNI kah, Kapolri kah, dalam penyusunan E-RDKK kalau melibatkan kepala desa, betul kejadian, yang tidak mendukung dia tidak dia masukkan sebagai penerima pupuk bersubsidi. Apa salahnya melibatkan Babinsa dengan Bhabinkamtibmas? Saya kira ini nanti E-RDKK-nya objektif. Sebab, masalah pupuk subsidi di daerah saya saja Pak harganya harga HET 11 Rp112.500 diperjualbelikan sampai 200.000 sampai 250.000. Ini berapa kali saya angkat, Aceh Tenggara Pak, karena insya Allah Bulan Juli kunjungan reses ke Aceh Tenggara Pak, sambil panen jagung, panen raya. Jadinya Pak, ini mungkin masukkan hampir setiap daerah Pak, bukan harga HET. Apalagi dalam RDP yang lalu ada dibilang pupuk itu harus beli lagi pupuk ini, baru bisa beli pupuk bersubsidi. Ini fakta yang ada di lapangan. Berita itu yang kami rasakan di daerah Pak. Kalau dulu tahun yang lalu selalu saya angkat sebelum beliau jadi *holding* pupuk sudah berubah, kemarin itu kan ada juga dalam kita rapat itu yang diangkat. Penyusunan E-RDKK tadi itulah kunci Bu Pimpinan, kalau tidak familinya tidak masuk, makanya bukan petani Pak, bukan petani. Apalagi dialihkan dengan petani sawit, siapa yang punya duit itu yang dapat pupuk. Inilah kejadian di lapangan. Pak Ali Jamil sudah hafal itu Pak.

Terima kasih itu saja masukannya Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik, terima kasih Bang Salim.

Itu kemarin juga sempat, isu ini kemarin juga sempat kita bicarakan Pak Menteri bahwa di lapangan itu beragam. Artinya di lapangan itu luar biasa juga tidak selalu *obey* dengan ketentuan yang sudah ditentukan sudah disepakati.

Pak Menteri, semua respons pertanyaan dan tanggapan dari para Anggota silakan untuk ditanggapi secara global. Mungkin ada beberapa satu dua pertanyaan yang hampir sama itu juga salah satu saja, artinya bisa mencakup semuanya. Secara detail mohon nanti juga Pak Menteri bisa menjawab secara tertulis, nanti dilanjutkan Kepala Bapanas, Pak PI dan Bulog juga.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih.

**Ibu, Bapak, Pimpinan yang kami hormati,
Komisi IV DPR RI yang kami banggakan,**

Izin kami menjawab secara global karena banyak yang sama dari belakang. Ini menarik Aceh Tenggara, tolong Pak Dirut ditindaklanjuti, dicabut saja izinnya Pak supaya efek jera. Kami sudah cabut izin di lapangan beberapa, mungkin sudah ada tujuh kami cabut di tempat, termasuk Kalimantan. Enggak bisa kompromi Pak di saat kritis seperti ini. Jadi Aceh tolong dicabut saja izinnya Pak, enggak usah ditanya, DPR kita percaya. Pak bukan anunya Pak, Pak Sali anunya Pak, dicabut izinnya, distributornya Pak, Oh, jadi gini cabut secara beradab.

Oke E-RDKK mungkin Pak, apa bisa? Kita kan semua cara kita harus gunakan sekarang, ini krisis pangan dunia krisis pangan Indonesia. Maaf Bu Ketua, Pak Ketua, baru saja kami komunikasi dengan FAO dua hari lalu dan menyurat resmi dan presiden sudah sampaikan bahwa *statement* beliau kita terancam dunia kelaparan itu 2050 dan enggak bisa dihindari. Makanya kita persiapkan dari sekarang dunia akan kelaparan kekurangan pangan, 2050 katanya sudah enggak ada lagi, enggak apa-apa enggak ini generasi kita Pak jangan Pak. Masih ada Anggota Komisi IV yang masih muda.

Berikutnya Bu, apa bisa juga coba dipertimbangkan Pak Dirjen. Ini, inilah pentingnya kita komunikasi dengan Komisi IV karena sama dengan meng-*cover* informasi seluruh Indonesia, apakah bisa kepala desa atau Babinsa atau Bhabinkamtibmas, salah satu. Jadi kalau tiga bisa bertandatangan, salah satu saja di dorong ke atas, malah pemikiran saya kalau kita percaya PPL saja, atau PPL, jadi atau semua, salah satu tanda tangan langsung kepala dinas sudah bisa kita sahkan. Diubah saja Permentannya Pak, dirubah ya, setuju Pak, karena ini sangat sensitif dan fundamental. Kita jangan sampai salah ambil keputusan.

Kemudian CPCL Pak, ini dari senior kita CPCL. Kalau ada CPCL pompa

saatnya sekarang, bukan Pak, aku butuh dari Bapak tapi tidak ada biaya pasangannya. Jadi kalau ada CPCL dari seluruh kita butuh sekali karena ada pompa masih ada separuh kita akan pasang. Dan, Bapak tahu di sini ada air, di sini tidak ada air. Dan, benar itu terjadi kemarin di Jawa Tengah kami langsung pindahkan. Benar kita harus terbuka saja Pak karena kita tidak boleh menutup kondisi menutup kesalahan dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau ada CPCL, kami *insya* Allah bisa tindak lanjuti.

Kemudian produksi turun iya Pak. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan *El Nino* itu sampai Juli. Ada yang mengatakan, kok *El Nino* padahal ada hujan? Hujannya Pak tidak seperti dulu, tiba-tiba dua minggu hujan kita tanam, tiba-tiba terhenti. Dan, itu terjadi di Jawa Tengah Jawa Timur, terhenti tanaman hangus. Nah ini yang terjadi sekarang dan tidak pernah kami temukan tidak pernah kami temukan Pak. Kami Ratas tadi kami sampaikan, Pak kebetulan Wakil Menteri Keuangan datang, Pak kalau ada yang ditunda jangan pertanian, kalau pertanian bermasalah seluruh sektor bermasalah, seluruh kementerian bermasalah, termasuk Bapak, itu kita Ratas. Memang agak tegas kami sampaikan. Oh iya Pak Menteri bisa enggak aku ketemu boleh Pak dengan DJA jadi janji ketemu. Pak ini tidak bisa ditunda, kalau jembatan mungkin bisa ditunda, Bansos mungkin masih bisa tertunda sedikit, BUMN masih bisa tertunda, tetapi kalau pangan tidak bisa ditunda, karena mati hidupnya bangsa tergantung pangan kita. Kalau pangan bermasalah, seluruh sektor bermasalah, tidak ada gunanya anggaran ribuan triliun turun kalau pangan bermasalah.

Ini kemarin sempat antre Bu kan kita lihat antre di Januari. Waktu kami dilantik saya katakan Januari-Februari *shortage* terjadi. Kenapa? Yang ditanam Pak Wandu waktu itu di sebelah sini mengatakan, Pak sudah enggak usah bicara pasti kita kekurangan Januari, karena yang ditanam 500 ribu hektar, kalau 1 juta baru kita aman, jadi tiga bulan kita sudah tahu. Sampai sekarang sampai September kita masih aman Bu, *Insya* Allah aman, tetapi yang berbahaya Oktober, November, Desember. Kenapa? Kita belum tahu berapa kita mampu tanam bulan ini bulan depan.

Alih fungsi lahan Pak Firman, betul Pak itu terjadi.

Petani Muda ya sudah lah beda sedikit saling memaafkan Pak. Saya Petani Milenial, Bapak Petani Muda. Alih fungsi lahan.

Kemudian ada tadi, ini ada capaian kami belanja kami itu 43% Pak, bukan 27, jadi kami di atas rata-rata nasional. Tadi kalau tidak salah Pak Guntur ya, bukan kami 43 Pak, 43% capaiannya Kementerian Pertanian kami bagi 365 hari *insya* Allah masih aman, kami di atas yakin di atas 90 Pak, 90%, jadi masih posisi aman. Anggaran Irjen Pak kami tambah bisa mungkin ditambah tapi 1% karena memang anggarannya yang tidak ada, yang mau menambahkan yang tidak ada jadi Pak Irjen mengerti karena beliau memang hemat karena beliau dari KPK dulu direktur. Oh belum saya perkenalkan sini? Oh sudah. Beliau Irjen sekarang

bintang 3, jadi Komjen Setyo Budi dan sekarang bintang 3 karena kepolisian bertambah 2 tahun berarti 3 tahun lagi bintang 3 nya, tapi kayaknya tidak lama bersama kita, kita doakan beliau. Itu rahasia kita.

Distribusi pupuk, Pak Direktur Pupuk, Pak ini aspirasinya dari teman-teman. Yakinlah kalau kita kolaborasi dengan baik Komisi IV, tujuannya Komisi IV kan baik, tujuan kita baik, tidak ada, kita saling membuka hati saja. Yang 134 Bapak buat surat resmi ke saya, saya buat resmi ke BPK itu rutenya Pak. Setelah itu, pasti ada solusi di BPK tetapi enggak usah disurati, kita datangi Pak, dampingi saya. *Insyallah* Pak aku janji aku datangi BPK ketemu langsung.

Pak Ono anggaran kita, terima kasih dukungannya Pak. Kenapa sebenarnya kami naikkan 34 triliun? Dulu 2015 satu kali 34 triliun, kemudian turun menjadi 22 triliun, kemudian turun lagi, tapi kita bisa swasembada tiga kali. Jadi kami ambil standar itu kemudian ekstensifikasi 1 juta hektar. Kami yakin karena kondisi yang sangat berat kami yakin ke depan bisa selesaikan ini Bu manakala ini disetujui, ini usulan kita disetujui. Jadi kita jangan memberatkan menteri berikutnya dengan Komisi IV berikutnya Bu, kecuali yang mau jadi Gubernur Jawa Barat kan lain, bupati di Aceh. Distributor itu perlu dipanggil secara adat.

Pak Sulaeman, Pak Sulaeman minta maaf perkebunan biaya memang aku yang ngambil, sudah Pak Dirjen gak usah lapor sama Pak Sulaeman, Pak Suleman itu sahabat saya, gak usah muter-muter aku yang ngambil itu karena sekarang beras yang bermasalah. Pak ada tadi jagung produksi jagung turun, saya tidak tahu jagung turun atau tidak naik, karena aku tidak perhatikan lagi data, aku perhatikan cukup dulu jagung baru saja kita ekspor 50 ribu ton dari Gorontalo, kita sudah ekspor yang dulunya impor 500 ribu ton. Jadi kita sudah ekspor karena kemarin harga turun sampai 2.800, ya Pak ya, di bawah PPAD ini Badan Pangan ini orang sportif jadi enak kerja sama. Saya bilang Pak turun, oh iya betul turun. Calon Pak, sudah Menteri Pertanian dulu, saya cuma melanjutkan Pak. Enggak usah ribut-ribut masalah takdir, takdir tidak pernah tertukar, kita jalani saja.

Cetak sawah betul Pak, Pak sahabat saya betul Pak Kalimantan Barat aman-aman Pak, tapi sebut juga kebaikan saya Pak kalau ada mana tau yang dulu jeruk itu sudah tumbuh, oh sudah tumbuh, itu gak pernah dikirim, jadi ya gak apa-apa saya sabar itu Bu, aku ingat itu satu persatu. Ini kalau Pak Ono ya memang dulu benih saja, benih jagung, tapi dulu yang dulu, tujuh tahun sudah delapan tahun yang lalu. Tapi yang bagaimana yang, nostalgia dikit Ibu ya, aku rindu kalau liat semua beliau. Ya bagaimana dulu yang kami datang itu tanam apa namanya haston, jalan tidak? Iya karena Bapak ganti saya, Bapak ganti saya tidak jalan hastonnya. Jangan Pak dibahas di sini sensitif.

Oke Pak Daniel cetak sawah betul Pak. Kita jadi ada cetak sawah, izin Pimpinan dengan Anggota Komisi IV, cetak sawah sekarang kami mau cetak kalau ada sumber air dekat, karena kalau tidak terjadi seperti itu, itu betul, Pak. Kami ketemu sebagian di Papua kemarin sama Merauke, Papua Selatan, ada yang

tumbuh tinggi ternyata jauh dari air, tapi yang dekat dengan air tetap diolah. Yang kedua adalah kami berikan alat mesin pertanian di wilayah yang baru tanam dulunya satu kali jadi tiga kali. Jadi itu Pak, jadi ada pompa diusahakan alat mesin pertanian juga ada di situ dan dekat air Pak. Cetak sawah ke depan ini dekat dengan sungai, karena kalau tidak, plus pompa, pompa Pak cetak sawah plus pompa.

Bibit benih, saya enggak tahu Pak, saya enggak bisa menyalahkan orang Pak mungkin salah kita ya. Ini anggaran kan turun terus kemudian bibit benih yang Ibu katakan itu, jujur begitu kami masuk kami ambil kembangkan lagi, ini bisa plasma nutfah kita hilang. Karena BRIN, seribu peneliti kita ke BRIN kemudian pertanian kosong dan itu kami kunjungi kami minta kemarin kerja sama dengan tadi saya sama-sama Kepala BRIN, Pak-Bu ini Merah Putih Indonesia, terserah namanya apa mau Kepala BRIN ambil itu kantor yang penting memanfaatkan alat yang triliunan kita sudah investasi. Jadi 1.200 kami undang semua dia tepuk tangan dia bersedia. Saya bilang terserah gajinya mau di mana, toh APBN RI. Jadi itu ke depan aku butuh dukungan juga dari Bapak, kalau bisa masuk dalam kesimpulan *Alhamdulillah*. Ke depan BRIN ini kembali meneliti di situ di tempat kami, apakah namanya, apa namanya kalau polisi itu ditugaskan, di BKO atau apa, tetapi ini sudah ditumbuhi rumput kantor kita lab-lab kita peralatan lab rusak karena tidak dipakai. Kenapa? BRIN absen sekali seminggu di kantor dan jarak jauh. Ketawa Pak Daniel, ya mengertilah Pak, tinggal kita ngopi baru kita bahas detail, tetapi tidak ada perkembangan bibit benih sekarang ini. Nah anggaran sudah turun, plasma nutfah kita hilang, ini ambang kehancuran nanti pangan kita kalau gini, makin tahun makin impor, makin besar impornya.

Dari PKS bukan 27 Bu ya, 43 serapan kami, 43% totalnya. Pupuk subsidi Bu izinkan kami, bukan kami protes, Bu aku ini ada menteri tidak ajak saya bicara gara-gara ini pupuk, selamat lebaran saja tidak dibalas. Jadi Ibu mengerti dengan saya, Bu sudah naik 100% itu pupuk, walaupun harus saya pertaruhkan diri saya, sudah naik Bu itu 28, ya, sudah ada suratnya ya Pak Dirut, di sini kelirunya Pak Dirut sampaikan Ibu Saadiyah, Bu sudah naik 100%. Kami cek sampai Papua sudah sebagian sampai. Memang ada menanyakan kemarin, maaf izin Bu Ketua, produksi belum naik bagaimana pupuknya belum sampai, ada 50% kami ngemis, kami undang menteri, kami undang gubernur, kami undang Kadis, terkadang satu provinsi cuma lima yang hadir, ya kita buka saja. Jadi maaf, seakan sebagian tidak peduli dengan republik ini dengan negara kita, padahal ini vital dan berbahaya kalau ini tidak di, itu kenyataannya di lapangan. Ada juga kita putuskan, Dirjen mumpung ada semua Bu, yang Ibu kemarin kita bahas masalah DAK. Teman-teman, Bapak, Ibu Komisi IV, DAK syukur-syukur Ibu-Bapak harus mengetahui, Pak Sekjen enggak boleh lagi mengetahui tidak diketahui sudahlah coret saja karena bikin susah kita, CPCL susah, ini macam-macam, kita kirim barang belum tentu ditandatangani cepat. Jadi mungkin kalau kita kompak mungkin ada *leverage* daya ungkitnya di lapangan Bu Ketua, Pak Ketua.

Pak Hanan, panen padi gogo, terima kasih Pak masukannya kita lanjutkan

itu Pak kami butuh kalau bisa produksi 6 ton itu sangat-sangat bagus. Minus 10 juta ton kalau Pak ini tidak meningkat itu terjadi, kalau ini tidak meningkat. Kemarin terakhir kami hitung itu kalkulasi 3,8 juta ton, impor 3,6 juta ton dan *El Nino overlap* dengan kekeringan sekarang. Ini surat BMKG tidak pernah terjadi kami langsung disurati. BMKG bahwa hati-hati dan itu sampai ke Presiden, seluruh menteri terkait dikirim minggu lalu bahwa kita harus waspada dengan pangan kita.

Ibu Endang sudah ya, *insya* Allah kami akan tindaklanjuti.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV. Kami mohon maaf kami bukan orang sempurna, kami banyak khilaf, apalagi awal-awal jujur kami konsentrasi penuh peningkatan produksi. *Alhamdulillah* ada hasilnya sedikit, jagung bisa ditunjukkan ada ekspor kita karena artinya kalau ada ekspor berarti produksi naik. Kemarin beberapa kali beberapa saat itu harga gabah di bawah HPP berarti itu produksi naik, kami tinggal ngecek itu, berarti ada produksi ada kenaikan produksi. Tetapi lompatan kita tidak bisa buat seperti tahun sebelumnya. Mudah-mudahan pompa ini bisa masuk dan pupuk tambahan pupuk bisa juga diserap oleh petani. Jujur kalau hati nurani saya seperti Ibu katakan, bahwa Bapak-Ibu katakan bahwa ada salah, malah pemikiran saya maaf, BBM itu kan siapapun masuk bisa ambil BBM subsidi di SPBU, mau Komisi IV, mau Ketua Komisi, mau menteri ambil BBM. Apalagi kalau ini, itulah alasan nanti kami sampaikan ke BPK bahwa BBM saja mungkin Ibu masuk ambil BBM kan subsidi tapi siapapun bisa. Nah kalau tidak naik motor masih bisa hidup bisa jalan kaki, tetapi kalau pangan enggak bisa kita tolerir. Izin ini jagung ini, ekspor kita baru-baru 50 ribu ton Mei, mudah-mudahan, memang agak turun lagi ke depan karena sempat harganya jatuh sampai 2.800, 3.000 di lapangan. Ini dari Gorontalo, juga kami datang ke di NTB Sumbawa juga produksinya cukup baik.

Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih. Sekali lagi kami dengan teman-teman dengan seluruh Eselon I, kami sangat yakin tidak bisa memberikan kepuasan maksimal pelayanan sebagai mitra yang optimal tapi yakinlah niat kami tidak ada sedikit pun untuk tidak menyenangkan Bapak-Ibu, tapi kami yakin kami punya kelemahan dan mohon kami dimaafkan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan. interupsi sedikit Pimpinan.

Pak Menteri, mungkin ada satu yang belum terjawab mengenai tindakan hukum terhadap alih fungsi lahan yang produktif tadi. Itu kan ada Undang-

Undanganya Nomor 9/2014. Nah sekarang ini sudah luar biasa. Kalau ini tidak ada sesekali tidak ada satu proses tindakan hukum, ini terus akan menghabiskan lahan petani kita yang produktif, sehingga apa yang Bapak sampaikan ini ancaman akan semakin terbukti untuk tidak mencapai produksi pangan nasional.

Makasih.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Makasih ini menteri, *eh sorry*, menteri senior ya senior kami. *Insyah* Allah saya sudah tanya Pak Irjen, buatlah saya surat kami tanda tangan ke Kapolri supaya minimal meredam alih fungsi lahan. *Insyah* Allah Pak Ketua, minggu depan ada beliau konsepkan, dan beliau, iya nanti dengan Reskrim kami sudah kerja sama sudah *MoU*, seperti pengawasan pupuk, bukan penangkapan Pak, kami sudah terang-terangan ke Kabareskrim, Pak Kabareskrim tolong di wilayah ini ada pompa kurang, kurang apa namanya, TKDN-nya, kami sudah saya katakan ini kurang. Kita sampaikan di depan, tapi sekarang kita butuh ini pompa karena tidak ada produksi lain kecuali ini. Beliau setuju, jadi mungkin *insyah* Allah ke depan, minggu depan Pak saya buat surat Pak Irjen buatlah saya surat saya tanda tangan beliau ngantar karena dengan Polri dekat.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Boleh usul Pak?

Kalau bisa Badan Pertanahan Nasional itu juga diingatkan, karena alih fungsi lahan pertanian itu biasanya adalah notaris mengajukan proses pengeringan, begitu pengeringan langsung DPRD bersama buatnya bikin Perda untuk membikin yang namanya tata ruang, tata ruang sehingga Depdagri Pak Setyo Pak Menteri ini perlu dilibatkan, karena mereka itu punya jaringan ke bawah untuk bisa memberikan juga sanksi kepada aparat.

Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Ya *insyah* Allah kami akan mungkin surat langsung, jadi bukan tembusan. Jadi ke Kapolri, tapi ke Pertanahan, itu betul Pertanahan itu biasanya dikeringkan kemudian lama-kelamaan ditimbun sedikit-sedikit jadi perumahan. *Insyah* Allah kami sampaikan. Kelihatan Pak Firman sudah masuk ke tataran kebijakan, kelihatannya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bu, sedikit Bu. Ada juga belum dijawab beliau, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Ini Golkar kok enggak selesai-selesai.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Koalisi Indonesia Maju.

Sedikit Pak Menteri, yang kan apapun ceritanya kan masalah anggaran. Apakah ini tidak ada pemikiran yang lain Pak supaya kita mendorong anggaran di Kementan tadi. Apakah perlu kami yang mewakili Komisi IV tadi Bu diberikan masukan agar bisa kami bicarakan di Banggar itu tujuan kami tadi Pak, supaya bahasanya itu bisa nyatu, jangan salah diartikan karena Pak Setyo itu mantan di sana juga Pak kan, supaya nanti pemahaman kita ya Pak Hermanto supaya satu arah di apa, makanya mungkin melalui Pak Sekjen. Pak Sekjen ini saya tengok keakrabannya sama menteri ini semakin hari semakin padu.

Yang kedua masukan Pak Menteri. Kan ada kami pun dapat ini mohon maaf Dirjen TP bukan apa, kalau ada yang ke Anggota-Anggota bibit-bibit itu dipercepat Pak. Kalau Bapak enggak dipercepat, Bapak ngomong ketahanan pangan, bibit masyarakat desa mau menanam pak, benih tidak sampai. Kalau ini Pak yang hari itu sudah Pak, yang ke depan ini. Ya ini kan MT Pak, MT bulan Juli, apa salahnya Pak? Contoh, Pak Budhy kurang apa bisa dialihkan ke tempat kami, ini kan tujuan kita untuk masyarakat itu bisa menanam ada dapat benih Pak, ini kalau benih pun Bapak cerita di sini ketahanan pangan, benih yang ada pun enggak Bapak salurkan. Yang hari itu sudah Pak, cuman dalam perjalanan, dalam perjalanan, itu maka Dirjen TP agak-agak sibuk itu Pak. Sudah janji kami tadi Pak *ndak* saya untkap, ini ke depannya yang saya maksud Pak.

Terima kasih Pak Menteri.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Paham Pak Salim, kita paham.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Jadi Pak Bupati yang Bapak minta dulu aku kirim, mestinya di ruang kecil

tadi jangan di sini, sudah, sudah sampai iya. Jadi gini para dirjen, para dirjen, begini Pak maaf, para dirjen teman-teman direktur, kami ini menteri beban kami 10 jangan ditambah jadi 12. Kalau Pak Salim ini ditambah lagi satu Pak Salim, ditambah satu. Jadi tolong beban saya 10 ambil dua ambil satu, maksudnya semua mitra kita ini buat nyaman semampu kita, jadi hati-hati regulasi saja Bapak jaga. Kan beliau tujuannya bagus untuk petani, jadi tolong dipercepat apalagi Pak Salim mengertilah yang begini, Pak Ono mengertilah, Pak Hanan, kan enak juga nanti kalau ada yang jadi gubernur ada yang jadi bupati turun, Pak Bapak dulu sering berteriak, sudahlah, sudah. Pak, dikirim terutama pompa karena kami butuh kalau bisa satu minggu ke depan CPCL-nya sudah ada khusus, enggak usah di-*anu* Pak, langsung ke Ibu Ketua, itu langsung ke saya, turun biasanya dengar tuh kalau aku kirim. Iya baik baik sekali beliau, cuma kalau aku digosipin enggak bilang sama saya begitu baiknya.

Terima kasih Ibu Ketua, terima kasih. *Insy* Allah Pak Salim bukan yang lain semua permintaan yang khususnya pompa atau benih masih ada, masih ada ya? Ada lima ribu Pak sudah dikirim, sudah sampai di Aceh atau baru di Lampung? Oh, Bapak minta tambahan berapa Pak? Iya lima ribu lagi dikirim. Iya sudah.

Oke Bu Ketua, Pak Ketua terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik terima kasih.

Terima kasih Bang Salim.

Pak Arief, silakan ada yang mau disampaikan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Badan Pangan Nasional tentunya sepakat ya Bu, Bapak Ibu semua bahwa kemandirian pangan tentunya itu yang kita dorong sehingga dengan Pak Menteri Pertanian kita selalu menyampaikan bahwa cadangan pangan pemerintah yang ada itu sebaiknya memang dari serapan dalam negeri. Tapi manakala kondisi-kondisi seperti kemarin kemudian sampai dengan tahun 2024 ini ada potensi demikian kami tentunya selalu berkoordinasi dengan Pak Menteri Pertanian.

Kemudian berikutnya mengenai khusus Pak Ono, itu mengenai normalisasi saluran sekunder dan tadi saya sampaikan ke Pak Mentan, kemudian Pak Menteri PUPR ya, jadi salurannya yang maksudnya Pak Ono yang ini nih saya tahu banget nih, jadi banyak eceng gondok, endapan dan lain-lain ya dan ini dinormalisasi kemudian *lining*-nya juga dicek ya. Dan beliau berjanji setiap kita melaporkan nanti

saya, Pak Ali Jamil, langsung ini kemarin di area Citarum kemudian langsung, langsung per telepon Pak tidak surat menyurat langsung dikerjakan. Jadi yang paling penting itu.

Kemudian berikutnya lagi, tentunya kalau boleh nanti sudah Babinsa terlibat pupuk segala sudah dapat datanya kemudian angkanya di atas anggaran, tolong itu didorong begitu. Jadi jangan sampai misalnya di-*collect* lebih dari 10 juta misalnya gitu ya di atas 9,5 ya itu yang harus didorong juga. Jangan nanti Bapak-bapak sudah meng-*collect* berebut di lapangan dan itu akan sangat menyulitkan yang di lapangan. Jadi mending tidak diberi subsidi sekalian daripada berantem di lapangan begitu. Itu yang terjadi di lapangan sebagai masukan Ibu Pimpinan.

Kemudian, tidak ada cara lain menaikkan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah yang dimaksud adalah yang dikelola oleh BUMN di bidang pangan, yang pertama adalah Pak Dirut Bulog ya, kemudian yang kedua adalah *ID Food*. Karena, hari ini yang diperlukan adalah anggaran juga ya untuk menyiapkan apa yang diproduksi oleh kementerian teknis ya sehingga cadangan pangan pemerintah itu cukup untuk meng-*cover* berikutnya dan menjaga harga di tingkat petani seperti yang Pak Mentan sampaikan.

Berikutnya lagi Pak Firman, dalam kondisi terburuk kemarin pun NTP itu masih terjaga di atas 104%. Artinya berbeda dengan sebelumnya bisa angkanya sampai 96%. Jadi, itu komitmen kita semua di pemerintah untuk menjaga pertanian kita. Jadi sebelumnya Pak Mentan untuk sebagai *update*, sempat 95% dan sekarang dijaga terus. Jadi pada saat panen tertinggi 5,5 juta ton pun ya masih terjaga di atas 100%.

Kemudian Pak Hermanto, khusus *demurrage*, nanti yang paling tepat untuk menjawab Pak Dirut Bulog karena *demurrage* itu belum selesai hitungannya ada *shipping line*, ada *insurance*, ada dan biasanya untuk ekspor impor itu hal yang biasa. Jadi pada saat orang meng-*export* atau meng-*import* ada bisa karena hujan misalnya, tidak bisa bongkar atau apa-apa nanti silakan Pak Dirut Bulog bisa menambahkan.

Yang lainnya mengenai sumber daya genetika di Kementan, pada waktu, izin Pak Mentan, pada saat menjabat PLT Menteri Pertanian walaupun 19 hari, sumber daya genetika ini kami sudah bersama BRIN, sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Mentan itu nyambung, sumber daya genetiknya sudah bisa dengan BRIN karena memang Presiden langsung ya memerintahkan kepada Kepala BRIN untuk menyiapkan benih-benih bibit-bibit unggul untuk pertanian di Indonesia.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Pak Bayu silakan dari Bulog.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BAYU KRISNAMURTHI):

Terima kasih Pimpinan.

Hanya untuk menambahkan soal *demurrage*. Jadi *demurrage* adalah biaya yang timbul karena keterlambatan bongkar muat. Ini adalah hal yang biasa jadi misalnya dijadwalkan lima hari jadi tujuh hari, mungkin karena hujan, mungkin karena di pelabuhan itu *crowded*, penuh dan sebagainya, demikian juga ada kemungkinan pas kebetulan hari libur sehingga buruhnya tidak ada dan seterusnya. Sehingga seperti disampaikan Pak Kepala Badan Pangan tadi, *demurrage* itu biaya yang menjadi bagianlah dari biaya yang harus sudah diperhitungkan di dalam kegiatan ekspor atau impor. Berapa persisnya itu masih terus diperhitungkan karena ada negosiasi misalnya dengan mana yang bisa *discover insurance*, mana yang tidak, mana yang apa harusnya menjadi tanggung jawab dari *shipping line*-nya, mana yang tidak, mana yang juga masih bisa dinegosiasikan dengan apa Pelindo maupun *forwarding* yang ada di pelabuhan. Jadi adanya biaya *demurrage* itu adalah hal-hal yang seperti tadi dikatakan menjadi bagian konsekuensi logis dari apa kegiatan ekspor-impor. Kita selalu berusaha untuk meminimumkan biaya *demurrage* dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk di dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor.

Demikian Pak Hermanto.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik.

Pak PI, silakan. Ada yang mau disampaikan?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI, BBA, MPA):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati dan banggakan.

Kami hanya ingin menegaskan saja berdasarkan aspirasi dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV dan juga arahan dari Menteri Pertanian, maka kita akan segera menulis surat kepada Menteri Pertanian atas lebih salur itu. Dan atas saran dari Pak Menteri tadi di dalam forum ini kita juga tidak akan melakukan tindakan berupa evaluasi kinerja atas tagihan yang sedang akan dievaluasi kembali oleh BPK.

Yang kedua kami juga ingin menegaskan arahan dari Pak Menteri untuk

selalu bertindak tegas terhadap distributor dan toko nakal, betul sudah diberhentikan 7 pada tahun 2024 ini tapi kalau dimulai dari sejak bulan Oktober Pak Menteri menjabat mungkin sudah *double* digit, jadi ketegasannya memang tidak tidak diragukan lagi.

Terima kasih penegasan itu saja Bu.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Dirut PI ada soal piutang PI yang ingin disampaikan?

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI, BBA, MPA):

Yang piutang terkait dengan subsidi masih *in progress* Bapak.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut Bulog mungkin terkait biaya *demurrage* ini memang kemarin ini beritanya di media memang agak menghebohkan, sehingga memang apa namanya membuat bingung kita yang di Komisi IV karena biaya *demurrage* itu sebetulnya biaya yang apa rutin lakukan kegiatan ekspor impor itu udah pasti ada begitu. Mungkin perlu dipertegas juga Pak biaya *demurrage* ini berapa sih besarnya Pak kok sampai heboh kayak begini?

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BAYU KRISNAMURTHI):

Kami masih berhitung Pak dan tadi masih melakukan negosiasi, jadi angka akhirnya belum selesai. Tetapi perkiraannya kalau dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor mungkin *insya* Allah tidak lebih dari 3% Pak.

KETUA RAPAT:

Sama kayak asuransi dong Pak?

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BAYU KRISNAMURTHI):

Iya Pak ya itu sudah masuk nanti, makanya bisa akan lebih kecil kalau nanti asuransi bisa bayar karena kan di situ proses lihat siapa yang apa sebabnya dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Ya sangat wajar sekali kalau.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Dibebankan harga jual kan?

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Sis silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA/HOLDING PANGAN ID FOOD (SIS APIK WIJAYANTO):

Terima kasih Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati.

Kami sangat mendukung program-program Kementerian Pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Bapanas. Untuk itu, kami punya beberapa anak usaha seperti PPI dan SHS itu juga bagaimana juga membantu untuk menyalurkan pupuk jadi pupuk baik subsidi maupun non-subsidi. Demikian juga SHS kami juga *support* untuk tentang benih juga, jadi benih padi. Lalu ada Berdikari juga yang bergerak di bidang *poultry* dan ternak juga. Jadi pada intinya kami juga siap untuk mendukung kemandirian pangan dan program untuk ke depannya makan bergizi gratis.

Demikian Ketua Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian Bapak-Ibu sekalian diskusi dan tanggapan dari Pak Menteri beserta jajarannya. Kita langsung masuk ke dalam pembacaan kesimpulan atau keputusan rapat kerja kali ini.

Saya persilakan Bu Anggia. Tolong ditayangkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Baik, Bapak-Ibu, Pak Menteri dan semua para mitra yang hadir, kita masuk ke dalam kesimpulan rapat. Saya akan bacakan,

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 per

tanggal 18 Juni 2024 sebesar Rp5.812.338.959.660,00 (*lima triliun delapan ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah*) atau sebesar 43,74% dari pagu anggaran sebesar Rp13.740.008.793.000,00 (*tiga belas triliun tujuh ratus empat puluh miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk mempercepat realisasi tahun anggaran 2024.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Setuju Bu Ketua.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 pada tanggal 5 April 2024 sebesar Rp8.066.479.021.000,00 (*delapan triliun enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah*). Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Setuju Bu Ketua.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Poin 3,

- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan tambahan anggaran 2025 sebesar.

Ini mendengarkan atau me, mendengarkan dulu? Oke mohon maaf.

- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp51.635.456.000.000,00

Mestinya “mendukung” ya? Mestinya “mendukung”, iya.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin Ibu Ketua. Saya kira bukan tambahannya 51 Bu, jumlahnya nanti mungkin 51.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Tambahannya dulu berapa, kita menyetujui tambahannya, tambahannya 51 oh ya, oh ya tapi “mendukung” kan bahasanya mestinya? Mendukung kok dari ini, bahasanya “mendukung”, oke, ya mendukung.

Baik saya ulangi.

- 3) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp51.635.456.000.000,00 (*lima puluh satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Oh oke, baik.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Setuju, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Angkanya sudah pas ya angkanya?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Persero untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap piutang klaim distributor pupuk akibat koreksi penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersepakat untuk menunda penagihan sampai diperoleh solusi penyelesaian yang tidak memberatkan kios dan petani.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Setuju Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Pupuk Indonesia? Oke setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Ketua, enggak ada tambahan ke distributor ya? Langsung ke kios saja?

KETUA RAPAT:

Penagihannya kepada distributor juga tidak, Pak Rahmad?

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Hanya ke distributor soalnya.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI, BBA, MPA):

Melalui distributor Bapak, jadi distri...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Sebenarnya sampai ke kios dan petani saja sih kalau menurut saya, ya sampai ke kios ya bebannya di situ. Setuju ya sudah diketok tadi.

Poin 5,

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan peran unit pelaksana teknis UPT di bawah Badan Standarisasi Pertanian bekerja sama dengan BRIN.

KETUA RAPAT:

Ini yang terkait dengan Bank Genetik tadi Pak Menteri?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Yang Pak Menteri disampaikan, iya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Izin bisa enggak Bu Ketua, itu langsung saja BSIP dengan BRIN. Semua peneliti dari Kementerian Pertanian 1.128, seribu, mungkin 1.300-an sekarang ya? 1.305 kalau bisa ini tandem berkantor di situ terserah mau diubah dua apa namanya dua logo pertanian BRIN, enggak masalah. Yang kita kejar adalah jangan benih-benih kita ini benih unggul hilang dan seluruh peralatan laboratorium dimanfaatkan dan kantornya kan besar sekali kantor kita, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Paham. Bahasanya seperti apa kira-kira? Dari tadi saya juga mencari bahasanya yang paling tepat karena kalau bahasa langsung menempatkan seribu sekian itu masuk di situ atau, ya makanya. Ada usulan?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Usulan Bu. "Meminta Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan kolaborasi antara BSIP, BSIP dan BRIN sektor pertanian. Jadi bukan semuanya, BRIN sektor pertanian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Sudah cukup begitu ya bahasanya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Korporasi bukan, bukan, BRIN sektor pertanian. Kenapa?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Karena BRIN kan banyak.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Ada BRIN-nya bukan macam-macam. Ya makasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Saya ulangi ya.

5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan kolaborasi antara Badan Standar Instrumen Pertanian dan BRIN sektor Pertanian.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Setuju Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik, Bapak-Ibu selesai sudah.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Bu Pimpinan, Bu Pimpinan, interupsi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Siap senior.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Boleh enggak nambah satu?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Apa?

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Kesimpulannya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Iya kan bukan nasi, ya kesimpulanlah.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Kalau bisa di poin 6 ditambah supaya Pak Menteri nanti punya alat untuk melakukan tindak lanjut, yaitu "Menteri Pertanian diminta untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan yang dibahas dalam Rapat Kerja pada hari ini, antara lain adalah tadi yang terkait dengan masalah alih fungsi lahan", sehingga nanti Pak Menteri ada apa dasar hukum untuk menindaklanjuti kepada menteri-menteri terkait dan yang lainnya mungkin.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (WAKIL KETUA/Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./F-PKB):

Iya kasih dan lain-lain karena kasus di Bang Salim yang pupuk harus beli itu juga perlu ditindaklanjuti.

Baik, Bapak-Ibu,

6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti temuan di lapangan di antaranya mengenai alih fungsi lahan dan lain-lain.

Apa itu, para Anggota?

Pak Menteri?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik, Bapak-Ibu selesai sudah pembacaan kesimpulan rapat kita kali ini.

Silakan Pak Budhy untuk menutup.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Menteri dan seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi IV atas Rapat Kerja kali ini. Sebelum kita mengakhiri Rapat Kerja ini saya minta Pak Menteri untuk memberikan kata penutup.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Komisi IV dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kami ucapkan tak terhingga atas *support*-nya selama ini dan juga sekaligus kami memohon maaf segala khilaf yang kami lakukan termasuk seluruh staf Kementerian Pertanian yang dirasakan hari ini belum optimal.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan atau kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR
NIP. 197401251993022001